



8 Maret 2016

Office of the Compliance Advisor Ombudsman (CAO)

INVESTIGASI KEPATUHAN

Investasi IFC di Delta-Wilmar (Proyek #25532 dan #26271)

Pengaduan 03

**Investigasi CAO mengenai Kinerja Lingkungan dan Sosial IFC sehubungan dengan:
Delta-Wilmar 03/Jambi (#25532 and #26271)**

Office of the Compliance Advisor Ombudsman for the
International Finance Corporation
Multilateral Investment Guarantee Agency
Anggota the World Bank Group

Daftar Isi

Mengenai CAO.....	3
Ringkasan Eksekutif.....	4
Singkatan	8
Ikhtisar Proses Kepatuhan CAO.....	9
1. Latar Belakang Investasi IFC.....	10
1.1. Investasi IFC di Wilmar.....	10
1.2. Wilmar International dan DW: Struktur Legal dan Finansial	10
1.3. Rantai Pasokan Delta Wilmar	10
2. Latar Belakang Investigasi Kepatuhan Wilmar-03 CAO.....	13
2.1. Pengaduan Wilmar-03.....	13
2.2. Proses Penyelesaian Sengketa CAO	14
2.3. Penilaian Kepatuhan CAO dan Kerangka Acuan Investigasi	15
2.4. Metodologi.....	15
3. Temuan CAO Terdahulu Sehubungan Dengan Investasi IFC di Wilmar	16
3.1. Pengaduan Wilmar Group Sebelumnya.....	16
3.2. Audit CAO Juni 2009 – Temuan dan Tanggapan.....	17
4. Jadwal Proyek.....	19
5. Temuan Sehubungan dengan Kinerja IFC.....	21
5.1. Pencairan Pinjaman DW oleh IFC	22
5.2. Pengawasan Pinjaman DW	25
5.3. Konsultasi dan Pengungkapan Dalam Hubungannya Dengan Pinjaman DW	31
5.4. Penyebab Mendasar Ketidakpatuhan	33
6. Kesimpulan	36
Lampiran 1: Ringkasan Temuan Kunci.....	38
Lampiran 2: Investasi IFC di Wilmar International	39
Lampiran 3: Pengaduan pada CAO Mengenai Wilmar	41
Lampiran 4: ToR Investigasi CAO	43
Lampiran 5: Ikhtisar Tanggung Jawab Staf IFC dan Siklus Proyek.....	45

Mengenai CAO

Misi CAO adalah menjadi mekanisme jalan lain independen yang adil, terpercaya dan efektif dan untuk meningkatkan akuntabilitas lingkungan dan sosial IFC dan MIGA.

CAO (Office of the Compliance Advisor Ombudsman) adalah badan independen yang melapor secara langsung kepada Presiden World Bank Group. CAO mengulas pengaduan dari masyarakat yang terkena dampak oleh proyek pembangunan yang dilakukan oleh dua cabang sektor swasta World Bank Group, International Finance Corporation (IFC) dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).

Kepatuhan CAO bertanggung jawab atas investigasi kinerja lingkungan dan sosial IFC dan MIGA, terutama sehubungan dengan proyek yang sensitif, untuk memastikan kepatuhan pada kebijakan, standard panduan, prosedur, dan ketentuan keterlibatan IFC/MIGA, dengan tujuan meningkatkan kinerja lingkungan dan sosial IFC/MIGA.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai CAO, silakan kunjungi www.cao-ombudsman.org

Ringkasan Eksekutif

Investigasi kepatuhan ini berkaitan dengan investasi IFC pada Delta Wilmar di Ukraina ("DW" atau "klien"). IFC menyetujui dua pinjaman ke Delta Wilmar: pertama sebesar \$17,5 juta pada tahun 2006 untuk mendirikan penyulingan minyak sawit *greenfield* di Ukraina; dan kedua sebesar \$45 juta untuk memperluas penyulingan Ukraina pada tahun 2008

DW adalah perusahaan *joint venture*, yang dimiliki bersama oleh Wilmar Group, konglomerasi agrobisnis besar yang memiliki spesialisasi dalam produksi dan perdagangan minyak sawit dan beroperasi di Asia, Eropa Timur dan Afrika.

Pengaduan

Proses kepatuhan ini dipicu oleh pengaduan tertanggal November 2011 dari koalisi LSM atas nama beberapa kelompok termasuk masyarakat adat dan petani yang tinggal di dekat perkebunan Wilmar Group di Indonesia. Pengaduan tertanggal November 2011 adalah pengaduan ketiga yang diterima oleh CAO dan dengan demikian disebut sebagai pengaduan Wilmar-03.

Pengaduan Wilmar-03 menimbulkan kekhawatiran tentang dampak lingkungan dan sosial ("E&S") rantai pasokan DW di Indonesia dengan fokus pada isu-isu lahan. Pengaduan menimbulkan kekhawatiran khusus mengenai PT Asiatic Persada ("PT AP"), sebuah perusahaan yang mengoperasikan perkebunan kelapa sawit di Jambi (Sumatera), dan sampai tahun 2013, dimiliki oleh Wilmar International ("Wilmar" atau "perusahaan induk").

Elemen spesifik pengaduan ini terkait dengan ketergantungan Wilmar pada unit paramiliter polisi Indonesia, brigade mobil atau BRIMOB untuk keamanan di wilayah konsesi PT AP. Pengaduan mengacu pada insiden pada bulan Agustus 2011 ketika konfrontasi dengan kekerasan antara penduduk lokal dan staf perusahaan dan keamanan memuncak saat pembongkaran pemukiman di dusun yang ditinggali oleh penduduk tersebut. Laporan verifikasi pihak ketiga yang ditugaskan oleh perusahaan induk menyatakan bahwa BRIMOB dan staf PT AP telah menggusur paksa orang-orang dari daerah konsesi, meskipun keterangan konflik berbeda.

Proses CAO

CAO mengulas pengaduan, dan menemukan bahwa pengaduan dapat dinilai lebih lanjut. Para pihak sepakat untuk memediasi dialog antara PT AP dan beberapa masyarakat lokal yang dimulai pada bulan Maret 2012. Namun, proses mediasi tertunda karena penjualan PT AP oleh perusahaan induk pada bulan April 2013. Pemilik baru memutuskan untuk tidak meneruskan mediasi yang difasilitasi CAO, dan sebagai hasilnya pada bulan September 2013 pengaduan dialihkan kepada fungsi kepatuhan CAO. CAO menyelesaikan penilaian kepatuhan pada bulan Juni 2014, dan menentukan bahwa pengaduan memenuhi kriteria CAO untuk investigasi kepatuhan. Dari bulan Agustus 2014 hingga Maret 2015, CAO melakukan investigasi sesuai dengan Panduan Operasional CAO dengan masukan dari staf CAO dan para panelis ahli.

Laporan Audit Juni 2009 CAO

Ini adalah kedua kalinya fungsi kepatuhan CAO mempertimbangkan kinerja E&S IFC dalam kaitannya dengan investasi Wilmar Group dengan keterkaitan rantai pasokan minyak sawit mentah ("CPO") ke Indonesia. Ulasan CAO sebelumnya pada investasi ini (untuk menanggapi pengaduan sebelumnya) disajikan pada Audit Juni 2009. Secara relevan, Audit Juni 2009 CAO menemukan bahwa uji tuntas pra-investasi IFC tidak secara tepat mempertimbangkan persyaratan Standard Kinerja 1 dalam kaitannya dengan risiko dan dampak yang terkait dengan rantai pasokan minyak sawit DW di Indonesia.

IFC merilis tanggapannya terhadap Audit 2009 pada bulan Agustus 2009. Sebagai tanggapan, IFC menyatakan setuju bahwa "perhatian yang lebih besar harus diberikan pada rantai pasokan CPO [DW]," mengungkapkan meningkatnya kemampuan perusahaan induk untuk melacak minyak sawit dari perkebunannya sendiri.

Mengingat temuan dari laporan Audit Juni 2009, investigasi kepatuhan ini hanya mempertimbangkan pengawasan IFC pada risiko rantai pasokan yang terkait dengan investasi DW yang dilakukannya pada periode pasca Juni 2009.

Temuan Investigasi

Laporan investigasi mempertimbangkan kinerja E&S IFC sehubungan dengan : (a) keputusan pencairan pinjaman pada DW di bulan Januari 2010; (b) pengawasan umum IFC pada pinjaman DW dari bulan Januari 2010 dan seterusnya; dan (c) pendekatan IFC untuk mengungkapkan dan melakukan konsultasi untuk risiko rantai pasokan yang melekat pada pinjaman ini.

Sehubungan dengan keputusan pencairan pinjaman pada bulan Januari 2010, CAO mencatat bahwa Audit tahun 2009 menyediakan temuan jelas bahwa IFC sendiri tidak menjamin bahwa analisis risiko rantai pasokan CPO DW dilakukan sesuai dengan Standard Kinerja. Perjanjian pinjaman DW mencakup syarat pencairan ("COD") persyaratan bahwa Delta Wilmar telah menyelesaikan penilaian sosial dan lingkungan sesuai dengan Standard Kinerja IFC (yang pada saat itu termasuk persyaratan identifikasi dan mitigasi risiko rantai pasokan). Pada bulan November 2009, IFC dan Bank Dunia memulai pekerjaan persiapan untuk proses strategi dalam kaitannya dengan portofolio minyak kelapa sawit secara umum. Hal ini menyebabkan keterlibatan para pemangku kepentingan di Indonesia dari bulan April 2010, termasuk pertemuan konsultasi dan bilateral. Namun, IFC tidak mengambil tindakan apapun untuk memastikan bahwa kekurangan yang diidentifikasi dalam Audit tahun 2009 dikoreksi dalam kaitannya dengan pinjaman DW sebelum pencairan. Secara khusus, tidak ada bukti bahwa penyelesaian penilaian sosial dan lingkungan yang sesuai dengan Standard Kinerja diperlukan. Sebagai akibatnya, CAO menemukan bahwa IFC telah mencairkan \$ 47,5 juta kepada DW pada bulan Januari 2010 tanpa meyakinkan dirinya bahwa COD E&S untuk pinjamannya telah terpenuhi.

Alih-alih, IFC membuat keputusan untuk mengatasi risiko rantai pasokan minyak sawit yang terkait dengan investasi DW melalui keterlibatan sukarela dengan perusahaan induk. Keputusan ini tidak konsisten dengan kebijakan E&S IFC. Dari perspektif kepatuhan, keterlibatan dengan perusahaan induk pada tingkat perusahaan seharusnya melengkapi review COD E&S yang menyeluruh untuk pinjaman DW.

Pada saat pencairan, CAO menemukan bahwa IFC tidak memiliki dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa pinjaman DW bisa diharapkan untuk memenuhi persyaratan rantai pasokan Standard Kinerja. CAO mencatat pandangan IFC bahwa keikutsertaan perusahaan induk dalam di Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan rencana sertifikasinya memberi IFC kepercayaan yang cukup besar dalam praktek manajemen rantai pasokan perusahaan. Namun, seperti yang ditunjukkan pada Audit tahun 2009, kegiatan ini tidak cukup untuk memenuhi persyaratan rantai pasokan PS 2006. Karena tidak adanya bukti bahwa klien memiliki rencana yang kredibel untuk mengatasi risiko rantai pasokan, CAO menemukan bahwa keputusan IFC untuk melakukan pencairan tidak sesuai dengan persyaratan Kebijakan Keberlanjutan.

Sehubungan dengan pengawasan umum IFC pada pinjaman DW, CAO menemukan bahwa IFC tidak membahas persyaratan PS bahwa klien menganalisa dan memitigasi risiko rantai pasokannya seperti yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman.

Sejauh IFC terlibat dalam kaitannya dengan risiko rantai pasokan tingkat perkebunan perusahaan induk, mereka melakukan ini melalui "Kajian Konsultan" yang ditugaskan IFC dalam kaitannya dengan kinerja E&S pada sampel dari enam perkebunan Wilmar di Indonesia. Perusahaan induk berpartisipasi dalam ulasan ini dengan memberikan konsultan akses ke properti, fasilitas, dokumen dan personilnya. Namun, fakta bahwa Kajian Konsultan ditugaskan dan diawasi oleh IFC berarti Kajian Konsultan diselesaikan di luar kerangka kepatuhan pinjaman DW. Meskipun temuan Kajian Konsultan dalam kaitannya dengan risiko sosial dan lingkungan di perkebunan yang dikunjungi, dan pembuatan rancangan rencana tindakan, tidak ada rencana tindakan untuk mengatasi risiko tersebut yang disepakati antara IFC dan baik oleh klien ataupun perusahaan induk.

Selanjutnya, CAO mencatat bahwa tim proyek IFC yang bertanggung jawab untuk mengelola pinjaman DW tidak terlibat dalam respon terhadap pengaduan yang memicu proses kepatuhan ini. Sebagai akibatnya, masalah yang diangkat oleh para pengadu tidak memberitahukan pendekatan IFC untuk pengawasan pinjaman DW.

Kesimpulannya, CAO menemukan masalah serius mengenai dampak yang terkait dengan rantai pasokan CPO DW di Indonesia, seperti yang diajukan oleh para pengadu, tidak secara memadai ditanggapi sebagai bagian pengawasan IFC pada pinjaman DW atau melalui hubungan antara IFC dan perusahaan induk.

Sehubungan dengan konsultasi dan pengungkapan, CAO mencatat bahwa masyarakat yang terkena dampak tidak diajak melakukan konsultasi dan tidak memiliki kesempatan untuk memberikan masukan untuk Kajian Konsultan atau rancangan rencana tindakan yang ditugaskan IFC sehubungan dengan perkebunan perusahaan induk di Indonesia. CAO juga mencatat bahwa sampai saat ini semua dokumen ini tidak diungkapkan, baik oleh IFC atau perusahaan induk. Konsultasi yang efektif, yang diatur dalam Standard Kinerja 1 IFC mensyaratkan "sebelum pengungkapan informasi yang relevan dan memadai, termasuk rancangan dokumen dan rencana", dan harus "memungkinkan masyarakat yang terkena dampak" untuk "menyatakan pandangan mereka mengenai risiko, dampak, dan tindakan mitigasi proyek". Proses Kajian Konsultan yang didukung oleh IFC tidak memenuhi persyaratan PS1 mengenai pengungkapan dan konsultasi.

CAO mengidentifikasi lima penyebab yang saling berhubungan untuk ketidakpatuhan yang ditemukan dalam laporan ini. Mereka adalah:

- (a) Kepercayaan yang kuat di antara staf IFC bahwa perjanjian yang mengatur investasi DW tidak membutuhkan klien untuk melakukan tindakan untuk mengatasi masalah rantai pasokan, meskipun ini adalah persyaratan yang jelas ada dalam Standard Kinerja 2006, yang dimasukkan dalam perjanjian investasi 2008 antara IFC dan DW;
- (b) Keputusan IFC untuk menanggapi masalah rantai pasokan minyak kelapa sawit Indonesia dengan perusahaan induk secara sukarela dan di luar persyaratan E&S pinjaman DW;
- (c) Tidak terhubungnya pekerjaan IFC pada tingkat strategi dan pada tingkat pengawasan pinjaman DW;
- (d) Tidak memadainya pemahaman mengenai masalah rantai pasokan minyak kelapa sawit secara umum, dan khususnya mengenai rantai pasokan Wilmar; dan
- (e) Masalah yang berkaitan dengan persyaratan rantai pasokan dalam PS dan penafsiran mereka.

Sehubungan dengan masalah yang diangkat oleh para pengadu, CAO menyimpulkan bahwa IFC gagal memenuhi sasarannya untuk memastikan proyek yang dibiayainya dioperasikan secara sesuai dengan Standard Kinerja.

CAO akan memantau tanggapan IFC untuk hasil investigasi ini.

Singkatan

AMR	Laporan Pemantauan Tahunan
BRIMOB	Brigade Mobil (kepolisian Indonesia)
CAO	Office of the Compliance Advisor/Ombudsman
COD	Syarat Pencairan
CPO	Minyak Kelapa Sawit Mentah
CSO	Lembaga Swadaya Masyarakat
DW	Delta-Wilmar
E&S	Lingkungan & Sosial
ESMS	Sistem Pemantauan Lingkungan dan Sosial
ESRS	Ringkasan Kajian Lingkungan dan Sosial
ESRP	Prosedur Kajian Lingkungan dan Sosial
FFB	Tandan Buah Segar
FPP	Program Masyarakat Hutan
GIIP	Praktik Industri Internasional yang Baik
IFC	International Finance Corporation
MIGA	Multilateral Investment Guarantee Agency
NGO	Organisasi Non-Pemerintah
NMGK	Nizhny Novgorod Fats & Oils Group
PS	Standard Kinerja
PT AP	PT Asiatic Persada
RSPO	Roundtable on Sustainable Palm Oil
SAN	Jaringan Pertanian Berkelanjutan
SEA	Penilaian Sosial dan Lingkungan
TOR	Kerangka Acuan
WBG	World Bank Group

Ikhtisar Proses Kepatuhan CAO

Pendekatan CAO untuk pekerjaan kepatuhan diatur dalam Pedoman Operasional CAO (Maret 2013).

Ketika CAO menerima pengaduan yang memenuhi syarat, pertama-tama akan dilakukan penilaian pada pengaduan untuk menentukan bagaimana CAO harus merespon pengaduan. Jika fungsi kepatuhan CAO dipicu, CAO akan melakukan penilaian mengenai keterlibatan MIGA/IFC dalam proyek, dan menentukan apakah investigasi dibenarkan. Fungsi kepatuhan CAO juga dapat dipicu oleh Presiden World Bank Group, Wakil Presiden CAO atau manajemen senior IFC/MIGA.

Investigasi kepatuhan CAO fokus pada IFC/MIGA, dan bagaimana IFC/MIGA memastikan kinerja lingkungan dan sosial (E&S) proyek. Tujuan investigasi kepatuhan CAO adalah memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, standard, pedoman, prosedur, dan ketentuan keterlibatan IFC/MIGA, dan dengan demikian meningkatkan kinerja E&S.

Dalam konteks investigasi kepatuhan CAO, yang dipermasalahkan adalah apakah:

- Hasil aktual E&S proyek konsisten dengan atau bertentangan dengan efek yang diinginkan dari ketentuan kebijakan IFC/MIGA; atau
- Kegagalan IFC/MIGA untuk mengatasi masalah E&S sebagai bagian dari penilaian atau pengawasan yang mengakibatkan hasil yang bertentangan dengan efek yang diinginkan dari ketentuan kebijakan.

Dalam banyak kasus, dalam menilai kinerja proyek dan pelaksanaan tindakan untuk memenuhi persyaratan yang relevan, perlu untuk meninjau tindakan klien IFC dan memverifikasi hasil di lapangan.

CAO tidak memiliki wewenang terhadap proses peradilan. CAO bukanlah sebuah pengadilan banding maupun mekanisme penegakan hukum, CAO juga bukan pengganti sistem pengadilan internasional atau sistem pengadilan di negara tuan rumah.

Setelah menyelesaikan investigasi kepatuhan, IFC / MIGA diberi waktu selama 20 hari kerja untuk mempersiapkan tanggapan publik. Laporan investigasi kepatuhan, bersama-sama dengan tanggapan dari IFC/MIGA kemudian dikirim ke Presiden World Bank Group untuk disetujui, dan kemudian dirilis untuk publik di situs CAO.

Dalam kasus di mana IFC/MIGA ditemukan tidak memenuhi kepatuhan, CAO akan tetap membuka investigasi dan memonitor situasi sampai tindakan yang diambil oleh IFC/MIGA bisa meyakinkan CAO bahwa IFC/MIGA sudah menangani ketidakpatuhan. CAO kemudian akan menutup investigasi kepatuhan.

1. Latar Belakang Investasi IFC

1.1. Investasi IFC di Wilmar

Wilmar Group adalah konglomerasi agrobisnis besar yang memiliki spesialisasi dalam produksi dan perdagangan minyak kelapa sawit dan beroperasi di Asia, Eropa Timur, dan Afrika.

Sejak tahun 2003, IFC telah melakukan empat investasi di Wilmar Group. Pertama, Wilmar Trading (IFC No. 20348) adalah pinjaman sebesar \$ 33,3 juta untuk membiayai perdagangan minyak kelapa sawit mentah ("CPO") grup ini. Investasi kedua adalah pinjaman sebesar \$ 17,5 untuk *joint venture* Wilmar untuk membangun penyulingan minyak kelapa sawit *greenfield* di Ukraina, Delta Wilmar CIS (IFC No. 24644). Ketiga, Wilmar WCap (IFC No. 25532) adalah jaminan \$ 50 juta untuk pembiayaan untuk memfasilitasi perdagangan CPO lebih lanjut. Investasi terakhir adalah pinjaman sebesar \$ 45 juta untuk *joint venture* yang sama untuk memperluas fasilitasnya di Ukraina, Perluasan Delta Wilmar CIS (IFC No. 26271). Rincian lebih lanjut untuk pinjaman ini dicantumkan dalam Lampiran 2.

Investigasi ini berfokus pada pencairan dan pengawasan dari dua pinjaman kepada Delta Wilmar, No. 24644 dan IFSC No. 26271 ("pinjaman DW"), yang mewakili investasi aktif IFC di Wilmar Group pada saat pengaduan Wilmar-03 diterima.

1.2. Wilmar International dan DW: Struktur Legal dan Finansial

Pada saat pinjaman DW loan disetujui pada tahun 2006 dan 2008, DW adalah *joint venture* 50:50 antara Wilmar International Limited ("perusahaan induk" or "Wilmar") dan Delta Exports Limited. Delta Exports adalah perusahaan perdagangan *bulk* yang berbasis di Singapura yang memiliki spesialisasi di negara-negara bekas Uni Soviet.

Para pihak dalam *joint venture* juga merupakan pemilik setara dari Alfa Trading Ltd., perusahaan Malaysia yang bertindak sebagai pemasok tunggal CPO untuk DW. Ketentuan pinjaman DW dan perjanjian jaminan antara IFC dan Wilmar mensyaratkan agar Wilmar mempertahankan setidaknya 50% kepemilikan dalam DW dan Alfa Trading.

Pada tahun 2008, DW melakukan merger dengan Nizhny Novgorod Fats & Oils Group ("NMGK"), produsen minyak dan lemak makan terbesar di Rusia. Sebagai hasilnya, DW kini dimiliki oleh Wilmar, Delta Exports, dan NMGK. Restrukturisasi ini juga memberikan sebagian kepemilikan Alfa Trading Ltd kepada NMGK. Restrukturisasi ini kemudian disahkan melalui amandemen pada perjanjian pinjaman dan jaminan.

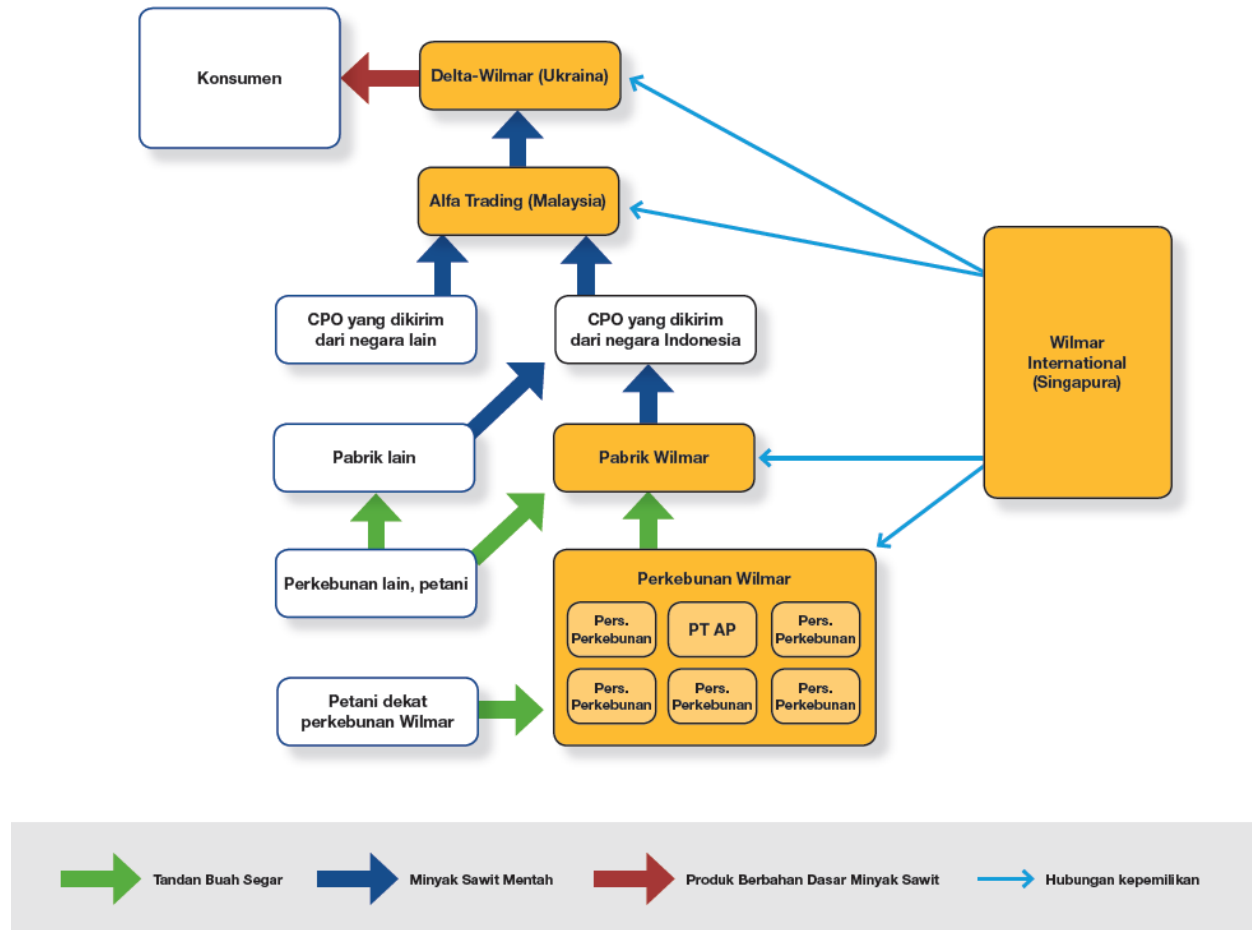
1.3. Rantai Pasokan Delta Wilmar

Pinjaman DW dimaksudkan untuk membiayai pembangunan dan perluasan kilang penyulingan minyak kelapa sawit di Ukraina. Setiap pengaduan yang diajukan kepada CAO mengenai grup Wilmar, termasuk pengaduan Wilmar-03, meningkatkan kekhawatiran tentang dampak E&S i rantai pasokan Wilmar di Indonesia, dan bukan operasi DW di Ukraina. Secara khusus, pengaduan menyoroti masalah E&S di perkebunan yang dimiliki Wilmar, termasuk PT Asiatic Persada ("PT AP").

Untuk keperluan peran Kepatuhan CAO, cukup dicatat bahwa tim proyek IFC memahami bahwa pada saat investasi DW telah disetujui ada keterkaitan antara perkebunan yang dimiliki Wilmar di

Indonesia dan operasi DW Ukraina. Pada saat penilaian, diperkirakan bahwa persentase pasokan DW yang berasal dari pabrik Wilmar adalah sekitar 40%, sebagian diantaranya berasal dari perkebunan yang dimiliki Wilmar.

Gambar 1: Rantai Pasokan DW



Keterkaitan ini diilustrasikan pada Gambar 1 di atas. Keduanya bersifat fisik, melalui rantai pasokan, dan hukum/keuangan, melalui Wilmar International yang memegang kepemilikan saham di Alfa Trading dan DW dan juga menjamin pinjaman DW pada IFC. Dalam hal rantai pasokan fisik, angka menggambarkan bahwa:

1. DW mengambil CPO melalui anak perusahaannya, Alfa Trading. Pada gilirannya, Alfa Trading mengambil CPO dari sejumlah lokasi, termasuk komponen yang signifikan dari Indonesia.
2. Perkebunan minyak kelapa sawit yang dimiliki Wilmar di Indonesia menghasilkan tandan buah segar (FFB) yang diolah menjadi CPO di pabrik yang dimiliki Wilmar dan oleh pabrik lainnya. Pabrik tersebut merupakan bagian dari pasokan CPO Indonesia yang dibeli oleh Alfa Trading.

Ada tiga rantai pasokan kunci yang menjadi inti bisnis DW:

1. Produk Berbahan Dasar Minyak Kelapa Sawit: rantai pasokan ini terdiri dari minyak sawit olahan dan produk nilai tambah lainnya yang terbuat dari CPO di pabrik Ukraina. Ini menghubungkan DW kepada pelanggannya.
2. Minyak Kelapa Sawit Mentah: rantai pasokan ini terdiri dari minyak kelapa sawit mentah yang disiapkan di pabrik lokal dekat dengan area perkebunan dan dipasok ke fasilitas pengolahan seperti pabrik DW di Ukraina. Pasokan CPO DW sepenuhnya disediakan dari melalui Alfa Trading. Pada gilirannya, Alfa Trading mendapat pasokan CPO terutama dari Indonesia dan Malaysia. Pemasok termasuk pabrik Wilmar sendiri, serta perusahaan dan pedagang minyak kelapa sawit lainnya.
3. Tandan Buah Segar: rantai pasokan ini terdiri dari buah kelapa sawit segar, ditanam di perkebunan yang dimiliki Wilmar atau oleh perusahaan lain atau petani kecil di Indonesia dan Malaysia, dan diangkut ke pabrik. Pabrik yang dimiliki Wilmar mengolah buah sawit segar dari perkebunan yang dimiliki Wilmar serta dari pemasok lain.

Angka di atas juga menggambarkan bahwa Wilmar International adalah perusahaan yang terintegrasi secara vertikal, dengan kepemilikan dan kepentingan manajemen yang signifikan dalam setiap tahap rantai pasokannya.

2. Latar Belakang Investigasi Kepatuhan Wilmar-03 CAO

2.1. Pengaduan Wilmar-03

Investigasi kepatuhan ini menanggapi pengaduan ketiga yang diterima oleh CAO dalam kaitannya dengan investasi IFC di Wilmar Group ("pengaduan Wilmar-03").

Pengaduan Wilmar-03 yang diterima pada bulan November 2011, dibuat oleh koalisi LSM dan organisasi masyarakat adat atas nama beberapa kelompok termasuk masyarakat adat dan petani yang diduga yang terkena dampak oleh perkebunan kelapa sawit Wilmar dan perkebunan yang menjadi sumber kelapa sawit Wilmar, khususnya di Sumatera dan Kalimantan (bersama-sama, "para pengadu").

Pengaduan menimbulkan kekhawatiran khusus mengenai PT Asiatic Persada ("PT AP"), perusahaan yang mengoperasikan perkebunan kelapa sawit di Jambi (Sumatera), dan pada waktu itu dimiliki oleh Wilmar International dan memasok CPO ke rantai pasokan Wilmar Indonesia. Pada bulan Maret 2012, CAO menerima surat tindak lanjut, yang menekankan masalah sistemik yang oleh para pengadu diduga tetap ada dalam rantai pasokan CPO Wilmar International. Para pengadu juga menekankan peran IFC dan Wilmar International sebagai anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil ("RSPO").

Berdasarkan surat pengaduan dan Laporan Penilaian Ombudsman CAO,¹ pengaduan tersebut dapat diringkas sebagai tuduhan sehubungan dengan hal-hal berikut ini:

- a) pelanggaran hak asasi manusia dan penggusuran paksa anggota masyarakat setempat (sekitar 83 anggota masyarakat) oleh personel PT AP dan BRIMOB di Jambi;
- b) Izin dan penanaman perkebunan tanpa membayar ganti rugi tanah dan properti lainnya yang diambil;
- c) Penggunaan tindakan koersif oleh PT AP untuk memaksa masyarakat di Jambi menerima ganti rugi yang dipandang bertentangan dengan Standard Kinerja IFC;
- d) Pembebasan lahan dan penyelesaian sengketa pada anak perusahaan Wilmar lainnya;
- e) konflik lahan yang belum terselesaikan dalam kaitannya dengan anak perusahaan Wilmar di Indonesia pada umumnya.

Para pengadu mencatat bahwa beberapa isu-isu ini telah diajukan di pengaduan sebelumnya kepada CAO, seperti yang dirangkum dalam Lampiran 3, dan bahwa beberapa telah diselesaikan sebagian melalui mediasi CAO dalam kaitannya dengan operasi anak perusahaan Wilmar tertentu di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dan di Riau.

Elemen spesifik pengaduan ini terkait dengan ketergantungan Wilmar pada unit paramiliter polisi Indonesia, brigade mobil atau BRIMOB untuk keamanan di wilayah konsesi PT AP. Pengaduan mengacu pada insiden pada bulan Agustus 2011 ketika konfrontasi dengan kekerasan antara penduduk lokal dan staf perusahaan dan keamanan memuncak saat pembongkaran pemukiman di dusun yang ditinggali oleh penduduk tersebut. Laporan verifikasi pihak ketiga yang ditugaskan oleh perusahaan induk menyatakan bahwa BRIMOB dan staf PT AP telah menggusur paksa orang-orang dari daerah konsesi, meskipun keterangan konflik berbeda.²

¹ CAO Ombudsman Assessment Report, Wilmar-03 -<http://goo.gl/49WyQT>

² TUV Rheinland "Laporan Verifikasi Penggusuran Pemukiman Masyarakat "Suku Anak Dalam" dalam Hak Guna Usaha – HGU PT Asiatic Persada," Agustus 2011: <http://goo.gl/7dqbWS>.

Para pengadu meminta agar pengaduan diselesaikan melalui:

- mediasi ganti rugi yang dinegosiasikan antara masyarakat yang terkena dampak dan publikasi kajian partisipatif independen mengenai operasi kelompok perusahaan Wilmar di Indonesia yang terkena dampak;
- diadopsinya prosedur operasi standard yang sudah direformasi oleh Wilmar yang memastikan Wilmar dan IFC melakukan tindakan perbaikan untuk mengurangi atau membatalkan bahaya yang dirinci dan memberi kompensasi pada mereka yang mata pencaharian dan lingkungannya telah dirugikan secara tidak dapat diperbaiki kembali.

Dalam diskusi dengan CAO, para pengadu mengingatkan bahwa IFC dan Wilmar adalah anggota RSPO, sebuah asosiasi yang diisi banyak pemangku kepentingan yang bekerja untuk meningkatkan keberlanjutan produksi kelapa sawit, termasuk dengan menetapkan standard untuk sertifikasi minyak sawit yang diproduksi secara lestari. Para pengadu menyatakan keprihatinan mereka bahwa IFC dan Wilmar telah melanggar prinsip-prinsip RSPO dalam hubungan mereka dengan (atau tidak bertindak dalam hubungannya dengan) masyarakat yang terkena dampak di Indonesia.

Pada bulan April 2013, perusahaan induk menjual PT AP kepada pemilik yang bukan merupakan anggota RSPO atau mengejar sertifikasi RSPO. Selanjutnya, para pengadu mengajukan kekhawatiran tambahan kepada CAO mengenai kebijakan dan prosedur IFC tentang divestasi kepemilikan klien di mana pengaduan telah diajukan kepada CAO dan penyelesaian sengketa sedang berlangsung.

2.2. Proses Penyelesaian Sengketa CAO

CAO menilai pengaduan memenuhi syarat untuk penilaian lebih lanjut, dengan alasan bahwa ada keterkaitan rantai pasokan yang jelas antara operasi Wilmar di Indonesia dan investasi IFC di DW. Dengan kesepakatan antara para pihak, CAO mengadakan dialog dimediasi antara PT AP dan beberapa masyarakat setempat yang dimulai pada Maret 2012. Proses dialog berujung pada mediasi terpisah untuk lima kelompok masyarakat yang tinggal di dekat PT AP. Namun, perubahan kepemilikan di PT AP pada bulan April 2013 berarti bahwa perjanjian interim tidak diformalkan atau ditaati.

Proses mediasi CAO ditunda karena manajemen baru PT AP meminta waktu untuk memahami proses. Namun, pemilik baru memilih untuk menarik diri dari mediasi pada bulan September 2013. Rincian dari proses dan hasil mediasi dicantumkan dalam Laporan Kesimpulan Penyelesaian Sengketa CAO.³

Pada bulan Desember 2013 kelompok masyarakat dengan klaim lahan yang bersaing dengan area konsesi PT AP secara paksa diusir dari rumah mereka. CAO menerima informasi bahwa rumah-rumah dibongkar dan daerah dibersihkan, yang dilaporkan dilakukan oleh kekuatan gabungan dari polisi, militer dan keamanan swasta perusahaan.

Setelah penutupan proses Penyelesaian Sengketa CAO, pengaduan Wilmar-03 dialihkan ke Kepatuhan CAO seperti yang dipersyaratkan oleh Pedoman Operasional CAO.

³ Laporan Kesimpulan Penyelesaian Sengketa CAO, Wilmar-03, Desember 2013 -<http://goo.gl/sLhZGS>

2.3. Penilaian Kepatuhan CAO dan Kerangka Acuan Investigasi

Pada bulan Juni 2014, CAO menyelesaikan penilaian kepatuhan pengaduan Wilmar-03 sesuai dengan Pedoman Operasional-nya. Penilaian tersebut menemukan bahwa kriteria untuk investigasi telah dipenuhi, dan mengidentifikasi sejumlah masalah yang harus dipertimbangkan, dengan memperhatikan hal-hal yang diangkat dalam pengaduan.

Berdasarkan Kerangka Acuan ("ToR") yang juga dikeluarkan pada bulan Juni 2014, investigasi ini membahas pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apakah IFC telah secara memadai meyakinkan dirinya sendiri bahwa persyaratan lingkungan dan sosial pencairan ("COD") pinjaman untuk DW sudah benar dipenuhi sebelum pencairan pada bulan Januari 2010;
2. Apakah IFC diawasi investasinya di DW sesuai dengan kebijakan, prosedur dan standard, E&S yang berlaku dan secara khusus:
 - Apakah IFC secara memadai meyakinkan dirinya sendiri bahwa DW melakukan analisis rantai pasokan sesuai dengan persyaratan PS 1;
 - Apakah IFC secara memadai meyakinkan dirinya sendiri bahwa DW memenuhi kewajibannya dalam kaitannya dengan konsultasi dan pengungkapan berdasarkan PS 1;
 - Apakah IFC secara memadai meyakinkan dirinya sendiri bahwa DW mengembangkan Rencana Tindakan untuk memenuhi persyaratan PS; dan
 - Apakah IFC merespons secara memadai masalah yang diangkat oleh pengaduan Wilmar-03 dalam konteks kewajiban E&S DW pada IFC.

Lebih lanjut, ToR mengatur bahwa investigasi ini akan memeriksa tindakan IFC hanya berkenaan dengan pengawasan investasinya di DW pada periode setelah finalisasi Laporan Audit Juni 2009 CAO terkait dengan pengaduan Wilmar-01. Ruang lingkup investigasi termasuk mengembangkan pemahaman tentang penyebab langsung dan mendasar untuk ketidakpatuhan yang diidentifikasi oleh CAO. Melihat mandat CAO, dan fokusnya pada kinerja IFC, investigasi tidak membuat temuan fakta baik yang berkaitan dengan kejadian di PT AP pada Agustus 2011, atau kinerja E&S klien secara lebih umum.

2.4. Metodologi

Investigasi ini dilakukan sesuai dengan Panduan Operasional CAO (2013)⁴ dengan masukan dari staf CAO dan panelis ahli. Dari bulan Agustus 2015 sampai Maret 2015, tim CAO mengkaji berbagai dokumen yang relevan. Tim melakukan wawancara dengan manajemen dan staf IFC yang memiliki pengetahuan langsung mengenai Proyek, dan dengan para pengadu.

Proses Investigasi Kepatuhan CAO ini berfokus pada kepatutan keputusan IFC untuk mencairkan pinjaman DW dan pengawasannya pada dampak E&S rantai pasokan investasi. CAO memutuskan bahwa tidak perlu untuk melakukan kunjungan ke lokasi untuk menyiapkan laporan investigasi.

⁴ Panduan Operasional CAO (2013) -<http://goo.gl/mdL4Rz>

3. Temuan CAO Terdahulu Sehubungan Dengan Investasi IFC di Wilmar

Pada bulan Juli 2007, CAO menerima pengaduan pertamanya sehubungan dengan investasi IFC di Wilmar Group (“Wilmar-01”). Pengaduan kedua diterima pada bulan Desember 2008 (“Wilmar-02”).

Audit kepatuhan CAO sebelumnya (“Audit 2009”) menilai investasi IFC di Wilmar Group sebagai tanggapan atas masalah yang diangkat dalam pengaduan Wilmar-01.⁵ Pengaduan Wilmar-02 ditutup pada tahun 2012, setelah selesainya proses penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh CAO.

Bagian ini memberikan konteks sehubungan dengan temuan Audit 2009 CAO mengenai investasi IFC di Wilmar Group.

3.1. Pengaduan Wilmar Group Sebelumnya

Pengaduan Wilmar-01 disampaikan pada bulan Juli 2007 oleh lembaga swadaya masyarakat atas nama masyarakat, termasuk masyarakat adat dan petani yang diduga terkena dampak oleh perkebunan kelapa sawit Wilmar di Sumatera dan Kalimantan, Indonesia. Pengaduan ini mengklaim bahwa kegiatan Wilmar Group di Indonesia melanggar sejumlah standard dan syarat IFC. Wilmar dan anggota masyarakat memilih untuk memasuki proses dialog untuk membantu menyelesaikan konflik di bawah panduan fungsi Penyelesaian Sengketa CAO. Negosiasi diselesaikan dengan perjanjian penyelesaian pada akhir tahun 2008, dan CAO melakukan pemantauan berkelanjutan dan dukungan pelaksanaan hingga pertengahan tahun 2013. Selain itu, pengaduan ini memicu Audit 2009, dibahas lebih lanjut di bawah ini. CAO memantau respon IFC terhadap audit tersebut sampai bulan Maret 2013.

Pengaduan Wilmar-02 disampaikan pada bulan Desember 2008 oleh kelompok masyarakat yang diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat, juga di Sumatera dan Kalimantan. Menanggapi pengaduan ini, tim Penyelesaian Sengketa CAO membantu untuk memperkuat mekanisme lokal dalam tiga proses penyelesaian sengketa yang sudah berlangsung di provinsi Jambi dan Riau, di Indonesia.⁶ Proses ini berujung pada kesepakatan antara para pihak di Riau, tetapi proses di Jambi belum mencapai penyelesaian yang memuaskan pada saat CAO menerima pengaduan ketiga pada bulan November 2011. Dua kelompok masyarakat yang terlibat dalam proses di Jambi mengajukan ulang klaim mereka ke CAO di pengaduan ketiga dan keprihatinan mereka telah dimasukkan ke dalam investigasi ini. CAO menutup pengaduan Wilmar-02 pada bulan Juni 2012, dan keterlibatannya diringkas dalam laporan kesimpulan yang tersedia di situs web CAO.⁷

Ringkasan masing-masing tiga pengaduan Wilmar dicantumkan dalam Lampiran 3.

⁵ Audit CAO untuk Investasi IFC di: Wilmar Trading (IFC No. 20348) Delta–Wilmar CIS (IFC No. 24644) Wilmar WCap (IFC No. 25532) Perluasan Delta–Wilmar CIS (IFC No. 26271)”, (“Audit 2009 CAO”) - <http://goo.gl/bt1wk9>

⁶ CAO, halaman Ikhtisar Kasus Wilmar-02 - <http://goo.gl/TFVA5M>

⁷ Laporan Kesimpulan Ombudsman, Wilmar-02, Juni 2012 - <http://goo.gl/7SRz6e>

3.2. Audit CAO Juni 2009 – Temuan dan Tanggapan

CAO menyelesaikan Audit 2009 mengenai investasi IFC di Wilmar Group untuk menanggapi pengaduan Wilmar-01 pada bulan Juni 2009.

Audit 2009 membuat temuan umum ketidakkepatuhan yang menyimpulkan bahwa IFC mengambil pendekatan *de minimis* untuk menginterpretasikan standard sehingga dapat mengecualikan penilaian risiko rantai pasokan Wilmar. Sehubungan dengan pinjaman DW secara khusus, CAO menyimpulkan bahwa IFC gagal untuk secara memadai menilai risiko rantai pasokan sesuai dengan Standard Kinerja.

IFC merilis tanggapannya terhadap Audit 2009 pada bulan Agustus 2009 ("Tanggapan Audit IFC").⁸ Dalam tanggapannya, IFC menyatakan setuju bahwa "perhatian yang lebih besar harus diberikan rantai pasokan CPO [DW]," mengungkapkan meningkatnya kemampuan Wilmar untuk melacak minyak kelapa sawit dari perkebunannya sendiri.

Setelah dirilisnya Tanggapan Audit IFC, Presiden World Bank Group pada saat itu Zoellick pada bulan Agustus 2009 dalam suratnya kepada pengadu mengatakan, bahwa World Bank Group tidak akan menyetujui investasi baru dalam minyak kelapa sawit sampai mereka telah mengembangkan strategi kelapa sawit.⁹ Surat tersebut juga menetapkan elemen-elemen kunci dari rencana tindakan ("Rencana Tindakan IFC"). Relevan dengan investigasi ini, Rencana Tindakan IFC termasuk poin berikut ini:

Tunduk pada dicapainya kesepakatan dengan Wilmar, dan sebagai bagian dari pengawasan berkelanjutan IFC pada DW, [IFC akan] menilai status kinerja E&S perusahaan serta hubungannya yang ada dengan masyarakat lokal yang terkena dampak operasi perkebunannya, dan merekomendasikan perbaikan yang diperlukan.¹⁰

Moratorium investasi kelapa sawit baru tetap berlaku sampai setelah World Bank Group merilis strategi minyak kelapa sawit baru pada bulan April 2011.¹¹

CAO mengeluarkan laporan pemantauan dalam kaitannya dengan Audit 2009 pada bulan April 2010 dan Maret 2013.¹²

Laporan pemantauan CAO Maret 2013 mencatat bahwa tanggapan IFC terhadap audit termasuk pengembangan pendekatan strategis untuk investasi kelapa sawit di masa depan; kajian keterlibatannya saat ini di sektor minyak kelapa sawit Indonesia; program *Advisory Services* yang ditujukan pada sektor minyak kelapa sawit Indonesia; dan komitmen untuk mengatasi beberapa temuan audit sebagai bagian dari tinjauan kebijakan yang sedang dilakukan IFC. CAO menyimpulkan bahwa komitmen dan tindakan IFC merupakan suatu "pendekatan yang cukup besar untuk menanggapi kesimpulan yang dicapai dalam Laporan Audit CAO." Pada saat yang sama, CAO mencatat bahwa fungsi pengawasannya diperpanjang hanya untuk sejauh bagaimana IFC mengatasi "kekurangan yang diidentifikasi dalam audit CAO karena mereka terkait dengan bagaimana IFC mendekati dan memproses investasinya" dan bahwa "CAO sepenuhnya mengakui bahwa penutupan temuan audit CAO adalah hanya satu bagian dari

⁸ Tanggapan IFC terhadap Audit CAO untuk Wilmar-01, 4 Agustus 2009 – bahasa Inggris: <http://goo.gl/VUY9f4>; Bahasa Indonesia: <http://goo.gl/odZcVP>

⁹ Surat dari Presiden Zoellick kepada Marcus Colchester dan para pengadu, 28 Agustus, 2009 - <http://goo.gl/57sNhn>

¹⁰ *Ibid*, halaman 3.

¹¹ World Bank (2011) Kerangka Kerja World Bank Group dan Strategi Keterlibatan IFC Strategy dalam Sektor Minyak Kelapa Sawit -<http://goo.gl/kfHrQz>

¹² Pemantauan dan pembaruan tanggapan IFC terhadap Audit 2009, 22 April 2010 -<http://goo.gl/rp14kJ>; Laporan Pemantauan dan Pengungkapan, 27 Maret 2013 -<http://goo.gl/qKiE9d>

sebuah pendekatan menyeluruh oleh IFC untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan sektor minyak kelapa sawit global." Atas dasar ini CAO menutup Audit 2009.

4. Jadwal Proyek

Jadwal di bawah ini mencantumkan kejadian-kejadian kunci sehubungan dengan pinjaman DW dan ketiga pengaduan pada Wilmar.

Tanggal	Tonggak Acuan, Kejadian dan Dokumen
2004	
April	Dewan Direksi IFC menyetujui investasi pertama di Wilmar Group (No. 20348) – \$33,3 juta sebagian dijamin untuk membiayai ekspor dan perdagangan.
2006	
Juni	Dewan Direksi IFC menyetujui investasi kedua di Wilmar Group (No. 24644) – pinjaman \$17,5 juta pada DW CIS untuk membiayai pembangunan kilang penyulingan CPO <i>Greenfield</i> di Ukraina.
Desember	Dewan Direksi IFC menyetujui investasi ketiga di Wilmar Group (No. 25532) - \$50 juta sebagian dijamin untuk menyediakan modal kerja untuk cabang perdagangan minyak kelapa sawit.
2007	
Juli	CAO menerima pengaduan pertama mengenai investasi IFC di Wilmar Group.
2008	
Oktober	Dewan Direksi IFC menyetujui investasi keempat di Wilmar Group (No. 26271) – pinjaman \$45 juta kepada DW CIS untuk membiayai perluasan pabrik pengolahan CPO di Ukraina.
Desember	CAO menerima pengaduan kedua mengenai investasi IFC di Wilmar Group.
2009	
Januari	Delta dan Wilmar membawa rekanan <i>joint venture</i> tambahan – NMGK (Rusia). Wilmar International mempertahankan 38,75% kepemilikan DW.
Juni	CAO merilis Laporan Audit kepatuhan dengan temuan berkaitan dengan Pengaduan Wilmar-01. Audit menemukan bahwa IFC menggunakan pendekatan <i>de minimis</i> saat melakukan uji tuntas pada rantai pasokan minyak kelapa sawit DW, yang melanggar PS1.
Agustus	Tanggapan Manajemen IFC terhadap Audit CAO. Presiden WBG Zoellick mengumumkan moratorium investasi CPO baru.
September	IFC memberitahukan restrukturisasi DW yang telah dilakukan pada bulan Januari 2009.
November	Pekerjaan analitis dan persiapan dimulai untuk menyusun strategi minyak kelapa sawit WBG/IFC.
Desember	IFC mengabulkan permintaan pembebasan untuk kesanggupan finansial pinjaman DW. Perjanjian yang mengatur investasi dan Wilmar menjamin bahwa amandemen mencerminkan struktur kepemilikan saham baru dan untuk memperpanjang tanggal pencairan dilakukan.
2010	
Januari	IFC melakukan pencairan kepada DW sebesar \$47.5 juta.
Maret	IFC mengeluarkan TOR untuk Kajian Lingkungan dan Sosial dari Kepemilikan Minyak Kelapa Sawit Wilmar di Indonesia.

Tanggal	Tonggak Acuan, Kejadian dan Dokumen
Mei	Konsultasi pemangku kepentingan mengenai masalah yang ada pada sektor minyak kelapa sawit diadakan di Medan (Sumatera Utara), Pontianak (Kalimantan Barat) dan Jakarta sebagai bagian dari persiapan untun strategi minyak kelapa sawit WBG/IFC.
Juli	Konsultan IFC memulai Kajian Kepemilikan Minyak Kelapa Sawit Wilmar di Indonesia.
2011	
April	WBG/IFC mengeluarkan laporan dan pernyataan terakhir mengenai strategi minyak kelapa sawit. Moratorium investasi CPO dicabut.
Mei	Konsultan IFC mengeluarkan temuan mengenai kepemilikan minyak kelapa sawit Wilmar di Indonesia.
Agustus	Perusahaan perkebunan Wilmar PT Asiatic Persada dan masyarakat lokal di Propinsi Jambi terlibat dalam konflik dengan kekerasan. PT Asiatic Persada membongkar pemukiman penduduk setempat.
November	CAO menerima pengaduan ketiga mengenai investasi IFC di Wilmar Group.
2012	
Maret	CAO memulai proses penyelesaian sengketa antara PT Asiatic Persada dan masyarakat setempat di Jambi sehubungan dengan pengaduan ketiga.
2013	
April	Wilmar memberitahu IFC mengenai niat mereka membayarkan pinjaman lebih awal. Wilmar menjual PT Asiatic Persada kepada grup perusahaan Ganda. CAO mengeluarkan laporan pemantauan terakhir dan menutup audit Wilmar 1.
Juni	DW CIS (No. 24644) ditutup.
Juli	Perluasan DW CIS (No. 26271) dibayar lebih awal. Wilmar International meminta pembebasan biaya pembayaran lebih awal. IFC memproses pembebasan.
September	PT Asiatic Persada, di bawah pemilik baru, mengakhiri keikutsertaan dalam proses penyelesaian sengketa yang dipimpin CAO. Pengaduan Wilmar-03 dialihkan ke Kepatuhan CAO.

5. Temuan Sehubungan dengan Kinerja IFC

Persyaratan E&S yang relevan untuk tujuan investigasi ini ditemukan dalam kebijakan dan prosedur IFC, serta perjanjian kontrak ditandatangani dengan DW. Kedua pinjaman harus diberikan oleh IFC sesuai dengan Prosedur Tinjauan Lingkungan dan Sosial ("ESRP"), yang memberikan panduan kepada staf IFC mengenai prosedur untuk mengkaji dan mengelola kinerja klien di seluruh siklus hidup proyek.¹³ Yang lebih awal dari kedua pinjaman, Pinjaman No 24644, menyertakan Kebijakan Perlindungan Lingkungan dan Sosial 1998 IFC. Pada tahun 2008, ketika Pinjaman No 26271 disepakati, Kebijakan tentang Keberlanjutan Sosial dan Lingkungan 2006 ("Kebijakan Keberlanjutan 2006") yang berlaku.¹⁴ Kebijakan Keberlanjutan 2006 menyertakan Standard Kinerja IFC ("PS 2006"), yang termasuk persyaratan tegas terkait dengan analisis dan manajemen risiko E&S rantai pasokan.¹⁵ Dokumen investasi IFC dalam kaitannya dengan Pinjaman No. 26271 mengakui penerapan PS 2006.

Karena pinjaman kedua tunduk pada standard 2006 yang lebih spesifik, CAO menyimpulkan bahwa mereka seharusnya telah diterapkan oleh IFC dalam hubungan mereka dengan DW sejak 2008 dan seterusnya. Oleh karena itu, laporan investigasi ini mempertimbangkan apakah tindakan IFC konsisten dengan persyaratan 2006 atau tidak.

Fokus investigasi kepatuhan ini adalah bagaimana IFC memastikan dirinya sendiri mengenai kinerja E&S proyek saat pencairan dan pengawasan pinjaman DW.

Secara lebih umum, investigasi ini mempertimbangkan apakah penanganan investasi ini oleh IFC konsisten dengan komitmennya pada prinsip "jangan merugikan" yang dinyatakan dalam istilah berikut: "dampak negatif harus dihindari jika mungkin, dan jika dampak tersebut tidak dapat dihindari, mereka harus dikurangi, dimitigasi atau dikompensasi dengan tepat" (Kebijakan Keberlanjutan, para 8).

Bagian ini membahas pencairan, pengawasan, dan pengungkapan secara berurutan, mencantumkan kebijakan IFC yang relevan, persyaratan klien, tindakan IFC, dan temuan kepatuhan CAO untuk setiap hal tersebut.

¹³ ESRP yang berlaku pada awal masa investigasi adalah v. 4, 2009, dan diperbarui dari waktu ke waktu. Prosedur Kajian Lingkungan dan Sosial, versi 4.0, 14 Agustus 2009 - <http://goo.gl/MP0C5j>

¹⁴ Kebijakan Keberlanjutan IFC, 2006 -<http://goo.gl/mXZ1Wi>

¹⁵ Standard Kinerja IFC, 2006 -<http://goo.gl/URv2JY>

5.1. Pencairan Pinjaman DW oleh IFC

Temuan Kunci

- Dalam tanggapannya terhadap Audit CAO 2009, manajemen IFC mengakui bahwa ada kekurangan dalam uji tuntas rantai pasokan untuk pinjaman DW.
- IFC tidak meyakinkan dirinya sendiri bahwa yang Persyaratan Pencairan E&S, karena mereka terkait dengan risiko dan dampak rantai pasokan, dipenuhi ketika memutuskan untuk mengucurkan \$ 47,5 juta ke DW pada bulan Januari 2010.
- Kebijakan IFC mengharuskan penerapan persyaratan rantai pasokan berdasarkan Standard Kinerja 2006 kepada DW. IFC justru berusaha untuk mengatasi masalah rantai pasokan dengan perusahaan induk secara sukarela. Keputusan ini tidak konsisten dengan kebijakan E&S IFC.
- Pada saat pencairan, IFC tidak memiliki dasar untuk menyimpulkan bahwa DW dapat memenuhi persyaratan rantai pasokan berdasarkan Standard Kinerja 2006. Oleh karena itu, keputusan untuk mencairkan tidak sesuai dengan Kebijakan Keberlanjutan (para.17).

5.1.1 Pencairan - Persyaratan IFC

Standard utama yang dipertimbangkan investigasi ini adalah persyaratan pada klien IFC untuk menilai dan mengelola risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan rantai pasokan mereka. Persyaratan ini diatur dalam versi 2006 Standard Kinerja IFC.

Standard Kinerja 1 (Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial) mengharuskan klien IFC untuk menilai dan mengelola risiko dan dampak lingkungan dan sosial dengan melakukan Penilaian Sosial dan Lingkungan ("SEA") dan dengan mengembangkan Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial ("ESMS"). Paragraf 6 meliputi inti kewajiban rantai pasokan yang dipermasalahkan dalam investigasi ini:¹⁶

Jika relevan, [SEA] juga akan mempertimbangkan peran dan kapasitas pihak ketiga (seperti pemerintah lokal dan nasional, kontraktor dan pemasok), sejauh mereka menimbulkan risiko untuk proyek, mengakui bahwa klien harus menghadapi risiko tersebut dan dampak sepadan untuk kontrol dan pengaruh klien atas tindakan pihak ketiga. **Dampak yang terkait dengan rantai pasokan akan dipertimbangkan di mana sumber daya yang digunakan oleh proyek adalah sumber daya yang sensitif secara ekologis, atau dalam kasus di mana biaya tenaga kerja yang rendah merupakan faktor dalam daya saing item yang disediakan** [Penekanan ditambahkan].

IFC mengharuskan klien memenuhi Standard Kinerja, dan melakukan negosiasi untuk tindakan spesifik dan persyaratan pencairan ("COD") yang harus dipenuhi sebelum dana dicairkan.

Kebijakan Keberlanjutan 2006 menyatakan bahwa "IFC tidak membiayai aktivitas bisnis baru yang tidak dapat diharapkan memenuhi Standard Kinerja dalam jangka waktu yang wajar".¹⁷

¹⁶ PS1, 2006, para. 6

¹⁷ Kebijakan Keberlanjutan, 2006, para. 17

ESRPs mengharuskan IFC memastikan setiap COD E&S terpenuhi oleh klien sebelum pencairan.¹⁸ Apabila COD tidak dipenuhi oleh klien, IFC harus menahan dana kecuali COD dibebaskan oleh seorang manajer di departemen E&S.¹⁹

Perjanjian yang mengatur Pinjaman No. 26271 menetapkan bahwa DW diharuskan mempersiapkan SEA sesuai dengan Standard Kinerja 2006 IFC.²⁰ Seperti disebutkan di atas, Standard Kinerja memasukkan persyaratan rantai pasokan tegas pada kerangka kerja E&S IFC untuk pertama kalinya. Persyaratan pencairan pertama untuk Pinjaman No. 26271 meliputi: (a) DW telah menyelesaikan SEA dalam bentuk dan isi yang memuaskan bagi IFC; (B) IFC dan DW telah menyepakati bentuk Laporan Pemantauan Tahunan ("AMR"); dan (c) DW telah menerapkan ESMS yang dapat diterima oleh IFC. DW juga harus menjamin bahwa semua risiko signifikan E&S sehubungan dengan proyek dicantumkan dalam SEA.

5.1.2. Tindakan IFC Terkait Pencairan

Penilaian Sosial dan Lingkungan Disiapkan berdasarkan PS 2006

CAO mencatat bahwa, meskipun sudah ada Standard Kinerja baru, tidak ada SEA yang diperbarui untuk DW yang dibuat ketika IFC menyetujui pinjaman No. 26271 kepada DW pada tahun 2008. Sebagaimana dijelaskan kepada CAO oleh staf IFC, ini dipandang tidak perlu karena perluasan pabrik pengolahan Ukraina yang akan didanai oleh investasi kedua tersebut tidak akan meningkatkan jejak karbon pabrik itu sendiri. Dengan demikian dipahami bahwa risiko E&S akan sama dengan investasi awal. Namun demikian, perjanjian pinjaman 2008 tetap mengharuskan SEA sesuai dengan PS baru untuk dilengkapi oleh klien sebelum pencairan.

Persetujuan Pencairan

IFC siap untuk memproses pencairan kepada DW pada akhir tahun 2009. Dokumentasi pencairan IFC mengakui temuan Audit 2009 CAO di mana IFC tidak secara memadai mempertimbangkan risiko rantai pasokan dalam kajian dan persetujuan pinjamannya kepada DW. Ini mengacu pada proses strategi minyak kelapa sawit yang akan dilakukan sebagai bagian dari Tanggapan Audit IFC. Dokumentasi pencairan IFC mencatat bahwa moratorium kelapa sawit tidak berpengaruh pada investasi IFC saat ini, termasuk pinjaman DW, dan merekomendasikan agar pencairan dilakukan asalkan COD dipenuhi. Dalam konteks ini, IFC mencatat bahwa mereka menganggap perusahaan induk dapat menjadi mitra strategis dan melalui perusahaan induk IFC dapat berkontribusi untuk mengatasi masalah E&S di sektor minyak kelapa sawit. Akhirnya, dokumentasi termasuk *check-box* yang mengkonfirmasi COD E&S yang telah diperiksa dan disetujui oleh Lead E&S Specialist IFC, tetapi tanpa pembahasan mengenai kajian ini. Tidak ada diskusi tentang kepatuhan DW pada persyaratan rantai pasokan berdasarkan PS, atau kecukupan SEA yang diperlukan yang diberikan persyaratan ini.

Pencairan ke DW sebesar total \$ 47.5 juta telah disetujui dan dibayar pada bulan Januari 2010.

¹⁸ ESRP v.4. Secara prosedural, Lead E&S Specialist diminta untuk mendapatkan informasi dari pemimpin gugus tugas ("TTL") untuk menentukan status setiap COD E&S, memberitahu TTL jika ada COD yang belum dipatuhi, dan memberikan izin yang jelas untuk COD yang dipenuhi, para. 6.2.2 and 6.3.2.

¹⁹ ESRP v. 4 2009, para. 6.2.1(a), 6.2.2.

²⁰ Dokumen kajian investasi, Pinjaman No. 24644 (November 2007 [ESRS]), dan Pinjaman No. 26271 (Agustus 2008 [PDS – Kajian Investasi] dan Oktober 2008 [Persetujuan PDS]).

5.1.3. Temuan CAO dalam Kaitannya dengan Pencairan

Pada tahun 2009, IFC mengakui adanya kekurangan dalam pendekatan untuk uji tuntas rantai pasokan dalam kaitannya dengan investasi di Wilmar. Namun, IFC mengambil tindakan yang tidak memadai dalam kaitannya dengan pinjaman DW untuk memastikan bahwa DW telah menganalisis atau mengatur langkah-langkah untuk mengatasi risiko rantai pasokannya sebelum pencairan.

Anggota staf IFC yang diwawancarai oleh CAO berpandangan bahwa perjanjian yang mengatur pinjaman DW tidak memberikan alasan atau tidak memberikan daya tawar yang memadai untuk mewajibkan tindakan tersebut dari DW dalam kaitannya dengan risiko rantai pasokan. Penafsiran ini tidak didukung oleh perjanjian, dan tidak konsisten dengan kerangka Kebijakan Keberlanjutan yang lebih luas IFC. Meskipun perjanjian pinjaman DW tidak secara gamblang merujuk pada kewajiban rantai pasokan yang terkandung dalam PS, mereka menggabungkan PS dengan referensi dan PS menggabungkan persyaratan analisis risiko dan pengelolaan rantai pasokan yang gamblang. CAO mencatat bahwa penyelesaian SEA yang sesuai dengan PS secara sesuai dengan COD akan memerlukan penilaian dan tindakan untuk mengatasi risiko rantai pasokan DW. Namun, IFC tidak memastikan sendiri bahwa SEA yang sesuai dengan PS telah disusun. Akibatnya, CAO menemukan bahwa IFC tidak memastikan bahwa COD E&S telah dipenuhi sebelum pencairan.

Dalam wawancara dengan CAO, staf IFC menyatakan bahwa keputusan dibuat untuk mengatasi masalah rantai pasokan melalui keterlibatan sukarela tingkat tinggi dengan perusahaan induk, dan bukan melalui mekanisme pinjaman DW. Dari perspektif kepatuhan, keterlibatan dengan perusahaan induk harus dilengkapi dengan kajian COD E&S yang ketat pada tingkat proyek.

Pada saat pencairan, CAO menemukan bahwa IFC tidak memiliki dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa pinjaman DW dapat diharapkan memenuhi persyaratan rantai pasokan Standard Kinerja selama periode waktu yang wajar. Tidak adanya bukti bahwa klien memiliki rencana yang kredibel untuk mengatasi risiko rantai pasokan, CAO menemukan bahwa keputusan IFC untuk mencairkan pinjaman tidak sesuai dengan Kebijakan Keberlanjutan (para.17).

5.2. Pengawasan Pinjaman DW

Temuan Kunci

- Pendekatan IFC untuk analisis, kajian dan pengelolaan rantai pasokan berkembang secara signifikan selama periode di mana pinjaman DW berada di bawah pengawasan.
- Namun, IFC terus memperlakukan pinjaman DW seakan-akan persyaratan rantai pasokan Standard Kinerja tidak berlaku.
- IFC tidak menyesuaikan pendekatannya untuk pengawasan pinjaman DW karena adanya informasi mengenai risiko E&S serius dalam rantai pasokan perusahaan. Secara khusus, IFC dalam pengawasannya terhadap pinjaman DW tidak memperhitungkan:
 - o temuan Audit 2009 CAO;
 - o temuan Kajian Konsultan mengenai Perkebunan Wilmar di Indonesia yang ditugaskan oleh IFC; dan
 - o pengaduan Wilmar-03 yang diajukan pada CAO pada bulan November 2011.
- IFC berusaha untuk menanggapi kekurangan dalam kinerja E&S di tingkat grup melalui keterlibatan sukarela dengan perusahaan induk. Namun, aktivitas ini tidak cukup untuk mengatasi risiko E&S dalam rantai pasokan DW.
- Penjualan PT AP oleh perusahaan induk selama proses penyelesaian sengketa CAO tidak menimbulkan masalah kepatuhan E&S. Namun, pertanyaan mengenai tanggung jawab IFC untuk dampak E&S proyek setelah keterlibatan IFC dalam proyek berakhir sering muncul dalam kasus CAO, dan akan memerlukan penjelasan lebih lanjut.

5.2.1. Pengawasan - persyaratan IFC

Investasi IFC tunduk pada pengawasan E&S sejak tanggal komitmen sampai investasi tersebut ditutup.²¹ Tujuan pengawasan E&S adalah "untuk mengembangkan dan mempertahankan informasi yang dibutuhkan untuk menilai status kepatuhan pada PS" dan persyaratan yang relevan lainnya.²² Sesuai dengan Kebijakan Keberlanjutan (para 26.):

Jika klien gagal memenuhi komitmen sosial dan lingkungannya seperti yang diungkapkan dalam Rencana Tindakan atau perjanjian hukum dengan IFC, [IFC harus] bekerjasama dengan klien untuk mengembalikan kepatuhan sejauh dimungkinkan, dan jika klien gagal membangun kembali kepatuhan, gunakan hak hukum jika diperlukan.

Kebijakan Keberlanjutan juga menyatakan bahwa IFC harus bekerjasama dengan klien untuk mengatasi perubahan dalam risiko E&S proyek yang timbul dalam proses pengawasan.²³

²¹ ESRP (2010) 6.1.

²² *Ibid*

²³ "Jika perubahan keadaan proyek akan menimbulkan dampak sosial atau lingkungan yang merugikan, [IFC akan] bekerjasama dengan klien untuk mengatasinya," (Kebijakan Keberlanjutan 2006, para. 26).

Seperti disebutkan di atas, pinjaman Perluasan DW mengharuskan DW untuk menilai dan mengawasi operasinya sesuai dengan persyaratan Standard Kinerja 2006, yang pada gilirannya termasuk persyaratan tegas untuk analisis dan pengelolaan risiko rantai pasokan.

DW juga diminta untuk memberikan laporan berkala mengenai kinerja E&S perusahaan dalam bentuk Laporan Pemantauan Tahunan ("AMR") sesuai dengan format yang telah disepakati (yang harus dikaji secara berkala dan diperbarui apabila ada perkembangan apapun dalam profil risiko proyek).

5.2.2. Tindakan IFC Terkait dengan Pengawasan Pinjaman DW

Setelah pencairan pinjaman DW, staf IFC terus terlibat dengan isu-isu sosial dan lingkungan di perkebunan kelapa sawit di Indonesia melalui proses pembentukan strategi kelapa sawit dan secara sukarela dengan Wilmar International. Namun, pada tingkat proyek, tim IFC yang bertanggung jawab atas pinjaman DW terus melakukan pengawasan sebagaimana apabila tidak ada persyaratan rantai pasokan yang diterapkan pada DW. DW mengajukan tiga AMR kepada IFC selama periode investigasi, tapi ini hanya melaporkan hal-hal E&S yang berkaitan dengan jejak karbon fasilitas di Ukraina, dan bukan masalah rantai pasokan. Demikian pula, dokumentasi pengawasan IFC dalam kaitannya dengan DW tidak mengacu pada persyaratan rantai pasokan apapun. Masalah rantai pasokan hanya sekali disebut dalam dalam dokumentasi pengawasan DW IFC yang terdapat dalam laporan kunjungan pengawasan lokasi pada tahun 2011. Laporan ini menyatakan bahwa masalah rantai pasokan dan aspek keberlanjutan pasokan minyak sawit ke pabrik diajukan oleh manajer operasional pabrik tetapi pertimbangan rantai pasokan tersebut dikelola oleh Wilmar Group dari kantor mereka di Singapura.

Rekomendasi untuk Klien dalam Strategi Minyak Kelapa Sawit IFC

Sebagai bagian dari Rencana Tindakan IFC dalam menanggapi Audit 2009 CAO, Kerangka Kerja World Bank dan Strategi IFC untuk Minyak Kelapa Sawit ("Strategi Minyak Kelapa Sawit") dirilis pada tanggal 31 Maret 2011, setelah beberapa kali melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pertemuan dengan masyarakat sipil dan perwakilan komunitas di Indonesia²⁴ Strategi Minyak Kelapa Sawit berisi panduan tentang pilihan pengelolaan rantai pasokan, dengan sejumlah rekomendasi tentang bagaimana klien IFC dapat mengambil langkah-langkah praktis untuk mengatasi risiko E&S dalam rantai pasokan mereka, termasuk:²⁵

1. Mengadopsi kebijakan rantai pasokan, termasuk komitmen untuk meningkatkan volume "komoditas yang dibeli yang sesuai PS" dari waktu ke waktu;
2. Mengembangkan database pemasok dengan tujuan menetapkan target untuk ketertelusuran, meningkatkan jumlah pemasok berisiko rendah, dan secara bertahap mencoret pemasok berisiko tinggi;
3. Bekerja dengan IFC untuk mengembangkan rencana implementasi untuk memitigasi dan/atau meminimalkan risiko E&S dalam rantai pasokan;
4. Melaksanakan program pelatihan untuk staf lapangan untuk mengembangkan kemampuan audit E&S sendiri; dan

²⁴ Kerangka Kerja World Bank Group dan Strategi IFC untuk Keterlibatan dalam Sektor Minyak Kelapa Sawit, 31 Maret 2011 -<http://goo.gl/FplZMi>

²⁵ *Ibid*, halaman 86 dan seterusnya.

5. Mengembangkan sistem untuk pemantauan terus menerus dan pelaporan secara berkala informasi E&S rantai pasokan kepada manajemen senior.

CAO tidak menemukan adanya indikasi bahwa IFC mengangkat salah satu elemen ini sebagai bagian dari pengawasannya atas pinjaman DW.

Keterlibatan Perusahaan Sebelum Kajian Konsultan Mengenai Perkebunan Wilmar di Indonesia

Seperti disebutkan di atas IFC membuat keputusan untuk mengatasi masalah rantai pasokan yang diangkat oleh Audit 2009 melalui keterlibatan sukarela tingkat senior dengan perusahaan induk. Hasil utama keterlibatan ini adalah Kajian E&S pada sampel perkebunan Wilmar di Indonesia, yang ditugaskan oleh IFC pada konsultan independen untuk dilakukan pada tahun 2010 ("Kajian Konsultan").

Kajian Konsultan mengenai Perkebunan Wilmar di Indonesia selesai pada bulan Mei 2011.

Kajian Konsultan menyertakan penilaian lapangan kelompok sampel enam perusahaan perkebunan yang dimiliki dan dikelola oleh Wilmar di Indonesia - tiga di Kalimantan dan tiga di Sumatera. Perkebunan ini termasuk tiga perkebunan yang telah terlibat dalam proses penyelesaian sengketa CAO, termasuk PT AP.²⁶ Melalui proses pengkajian, Konsultan menyusun "cekris lapangan" untuk mempertimbangkan apakah operasi perkebunan Wilmar konsisten dengan Standard Kinerja IFC dan standard RSPO dan Jaringan Pertanian Berkelanjutan (SAN) yang relevan. Tim konsultan terdiri dari tiga profesional dengan keahlian dalam keanekaragaman hayati, pengelolaan perkebunan berkelanjutan, isu-isu masyarakat dan masyarakat adat, ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan. Tim menghabiskan tiga hari untuk mengunjungi setiap perkebunan.

Kajian Konsultan menemukan bahwa perkebunan Wilmar yang dikunjungi umumnya mampu memenuhi persyaratan hukum, lingkungan dan sosial, dan memiliki kemampuan pelatihan dan organisasi yang baik dengan masing-masing perusahaan perkebunan telah menyelesaikan persyaratan hukum Indonesia untuk penilaian dampak lingkungan. Kajian Konsultan juga mencatat bahwa perusahaan menerapkan prosedur operasi standard pada pembebasan lahan. Prosedur ini termasuk pembayaran kompensasi, dan dinilai sudah transparan, konsultatif dan inklusif.

Namun, Kajian Konsultan juga membuat sejumlah temuan yang lebih penting dalam kaitannya dengan operasi perusahaan perkebunan, khususnya dalam kaitannya dengan: (a) kurangnya penilaian dampak sosial dan sistem pengelolaan sosial; (b) kekurangan dalam pendekatan konsultasi dan pengungkapan dengan masyarakat yang terkena dampak (termasuk pada perkebunan yang telah mendapat sertifikasi RSPO); (c) masalah yang belum terselesaikan sehubungan dengan kompensasi perpindahan ekonomi masyarakat dan (d) pendekatan yang

²⁶ Pada saat pengkajian, Wilmar dilaporkan memiliki 36 perkebunan aktif di Indonesia, masing-masing dikhususkan untuk perkebunan. Empat perusahaan dimiliki secara minoritas oleh Wilmar atau tidak aktif.

belum berkembang untuk pengelolaan risiko keamanan dalam konteks di mana personel keamanan bersenjata dikerahkan.²⁷²⁸

Tindak Lanjut IFC atas Kajian Konsultan

Kajian Konsultan termasuk rancangan rencana tindakan yang menurut laporan staf IFC diberitahukan pada perusahaan induk. Namun, staf IFC menegaskan bahwa, meskipun IFC berupaya untuk melibatkan, tidak ada rencana tindakan yang disepakati.

IFC menyiapkan briefing untuk Kajian Konsultan untuk diedarkan secara internal dan surat pendahuluan untuk diteruskan ke CAO. Meskipun surat Presiden World Bank pada bulan Agustus 2009 telah menjelaskan Kajian Konsultan sebagai "bagian yang membentuk pengawasan DW yang sedang berlangsung", surat pencahulan IFC untuk CAO mencatat bahwa: "Diakui bahwa Kajian E&S sebagian besar bersifat retrospektif yang hasilnya tidak dapat diterapkan untuk Wilmar [Internasional] karena mereka tidak lagi menjadi klien IFC." CAO mencatat bahwa, pada saat Kajian Konsultan diselesaikan pada bulan Mei 2011, investasi IFC di DW masih aktif, dan ini termasuk persyaratan pengelolaan risiko rantai pasokan berdasarkan Standard Kinerja 2006.

Peristiwa di Propinsi Jambi, Agustus 2011

Setelah diselesaikannya Kajian Konsultan, peristiwa yang memicu pengaduan Wilmar-03 terjadi di wilayah konsesi PT AP di Propinsi Jambi. Selama tanggal 8-12 Agustus 2011 serangkaian konfrontasi antara personel PT AP, petugas keamanan, anggota BRIMOB, polisi dan anggota masyarakat setempat memuncak saat pembongkaran rumah-rumah dan pengusuran paksa sejumlah orang yang tinggal di pemukiman di wilayah konsesi PT AP. Wilmar International, masyarakat dan LSM memberikan laporan yang berbeda tentang peristiwa yang terjadi, dan CAO tidak dapat mengambil posisi dalam kaitannya dengan rincian peristiwa ini. Namun demikian, tidak terbantahkan bahwa:

1. Sengketa antara PT AP dan masyarakat atas hak tanah dan kompensasi yang sesuai sudah berlangsung lama;
2. Pencurian FFB di area konsesi PT AP adalah masalah yang diketahui sering dihadapi oleh perusahaan perkebunan;
3. Sebagai akibat dari konflik dan pencurian yang sedang berlangsung, PT AP telah melibatkan BRIMOB untuk mengamankan daerah perkebunan.

²⁷ Sehubungan dengan masalah keamanan, laporan konsultan mencatat ketergantungan pada unit pasukan khusus kepolisian Indonesia (BRIMOB) untuk keamanan pada dua perkebunan yang dikunjungi. Meskipun kajian tersebut menyatakan belum ada laporan mengenai penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan dari anggota masyarakat yang diwawancarai, laporan mencatat bahwa BRIMOB diberdayakan di daerah dengan resiko keamanan yang sangat tinggi. PT AP menjadi salah satu contoh daerah seperti itu. Kajian mencatat bahwa anggota masyarakat yang diwawancarai menyebutkan perilaku kekerasan baru-baru ini dilakukan oleh kelompok tertentu yang menentang manajemen perkebunan. Ini termasuk pembunuhan manajer perkebunan sebelumnya, dan tangan satpam yang dibacok sampai putus. Laporan ini mencatat bahwa perwakilan masyarakat lokal yang diwawancarai di sekitar PT AP menyatakan lebih memilih adanya BRIMOB untuk perlindungan diri mereka sendiri. Sehubungan dengan PT AP, Kajian juga mencatat bahwa ada negosiasi yang sedang dilakukan untuk kompensasi bagi masyarakat atas perpindahan yang terjadi pada tahun 1986.

²⁸ Catatan pada 2005, Dinas Akuntabilitas Pemerintahan AS menerukan dalam Laporan Komite Kongresional bahwa dengan memberikan pelatihan pada anggota BRIMOB, AS telah melanggar hukum yang mengatur penyediaan dana untuk unit keamanan asing dan Departemen Luar Negeri AS memiliki bukti yang kuat bahwa unit ini telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat -<http://goo.gl/UHQSTV>

LSM lokal dan Wilmar membuat pernyataan pers dan merilis laporan peristiwa dari bulan Agustus-November 2011, ketika pengaduan Wilmar-03 disampaikan kepada CAO.²⁹ Pada bulan Maret 2012, para pengadu mengirimkan surat tindak lanjut yang mendesak CAO untuk mempertimbangkan isu-isu sistemik yang lebih luas yang berkaitan dengan rantai pasokan Indonesia Wilmar, dan mengacu pada persyaratan dalam prosedur RSPO dan kebijakan dan prosedur IFC sendiri. Pada saat yang sama, proses mediasi bersama dimulai di propinsi Jambi, didukung oleh CAO dan pemerintah daerah dan propinsi³⁰ Manajemen IFC mengetahui perkembangan ini, tapi tidak secara aktif terlibat dalam proses Penyelesaian Sengketa CAO.

Kegiatan Pengawasan akhir dalam Kaitannya dengan DW Pinjaman

Dokumen pengawasan akhir IFC dalam kaitannya dengan pinjaman DW diselesaikan pada bulan Agustus 2012, dan berfokus pada AMR 2011 klien dan kunjungan ke fasilitas di Ukraina. Dokumentasi pengawasan IFC tidak mengandung pembahasan risiko rantai pasokan karena mereka terkait dengan DW, dan tidak ada pengakuan mengenai masalah yang diangkat dalam pengaduan Wilmar-03 atau kegiatan Penyelesaian Sengketa CAO yang sedang berlangsung. Investasi mendapat Penilaian Risiko E&S 2 – yang menunjukkan kinerja yang memuaskan.

Divestasi PT AP

Wilmar International mengumumkan rencananya untuk menjual PT AP ke Prima Fortune International Ltd dan PT Agro Mandiri Semesta di surat kabar lokal Indonesia pada tanggal 23 Maret 2013. Wilmar International memberitahu mediator CAO mengenai penjualan ini dalam pertemuan pada tanggal 29 Maret.³¹ Dalam korespondensi dengan para pengadu, Wilmar menyatakan:

Pembeli sudah sangat mengetahui kemajuan dan status mediasi, dan kami telah mendorong mereka untuk melanjutkan proses mediasi. Pembeli telah menyatakan minatnya dalam melakukan itu. Kami akan bekerja untuk memastikan bahwa serah terima proses kepada pembeli akan dilakukan dengan tepat, dan akan membantu mereka kapanpun kami bisa untuk memastikan transisi yang lancar.³²

Pada bulan Juli 2013, pengadu menulis kepada IFC dan meminta klarifikasi resmi tentang "prosedur dan perjanjian yang dimiliki IFC ketika perusahaan klien yang berada dalam hubungan aktif dengan IFC secara sepihak melepaskan diri dari kepemilikan".³³ Secara khusus, para pengadu khawatir bahwa, "jika klien IFC dapat menghindari tanggung jawab mereka hanya dengan menjual operasi di mana mereka melakukan pelanggaran, seluruh sistem Standard Kinerja untuk menghindari risiko yang ditetapkan ada dalam bahaya."³⁴ Para pengadu memberitahu CAO bahwa mereka tidak menerima tanggapan dari IFC untuk surat ini.

Pembayaran Lebih Awal dan Penutupan Pinjaman No. 26271

²⁹ Marcus Colchester, Patrick Anderson, Asep Yunan Firdaus, Fatilda Hasibuan and Sophie Chao, "Human Rights Abuses and Land Conflicts in the PT Asiatic Persada Concession in Jambi", November 2011, <http://goo.gl/0HVTcp>; ²⁹ "Wilmar Reaffirms Commitment to Respecting Human Rights" (30 August 2011), <http://goo.gl/9PldfV>; TUV Rheinland "Laporan Verifikasi "Suku Anak Dalam" Penggusuran Pemukiman Masyarakat dalam area Hak Guna Usaha PT Asiatic Persada." Agustus 2011: <http://goo.gl/7dqbWS>.

³⁰ Dibahas dalam Laporan Penilaian Ombudsman CAO, Juli 2012, 5.1.

³¹ Jeremy Goon, CSR – Group Head, Wilmar, Surat kepada kelompok pengadu, tertanggal 30 Mei 2013 Ttg: Penjualan Asiatic Persada -<http://goo.gl/GyrYYb>

³² *Ibid.*

³³ Marcus Colchester dan pengadu, Surat kepada IFC, 4 Juli 2013 -<http://goo.gl/bSzQDB>

³⁴ *Ibid.*

Pada bulan Juni 2013, klien meminta pembebasan persyaratan kredit tertentu dalam perjanjian yang mengatur pinjaman DW untuk memungkinkan mereka untuk meningkatkan keuangan untuk perluasan lebih lanjut pabrik di Ukraina. Setelah negosiasi gagal, klien membayar lebih awal sisa pinjaman No. 26271. Pada titik ini IFC tidak memiliki investasi lebih lanjut atau hubungan hukum dengan perusahaan induk atau dengan DW.

Ulasan Internal IFC mengenai Kinerja E&S di bawah Pinjaman DW

IFC melakukan evaluasi diri pada, sampel acak yang representatif dari proyek-proyek investasi mereka. Kelompok Evaluasi Internal (IEG) IFC kemudian melakukan kajian independen pada kinerja dan penilaian proyek, dan menyesuaikan mereka jika diperlukan.³⁵ Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai kinerja proyek dan untuk mempelajari apa yang berhasil dalam konteks proyek tersebut. Pengungkapan dokumen evaluasi tersebut diatur oleh Kebijakan Akses ke Informasi IEG.³⁶ Relevan dengan investigasi CAO, kajian yang dibuat oleh tim proyek untuk Pinjaman No 26271 difokuskan pada kinerja E&S di lokasi Ukraina. Ini menilai kualitas kerja E&S IFC dalam penyaringan, persiapan dan penilaian sebagai "Sangat Baik." Kajian mencatat bahwa penilaian telah mempertimbangkan risiko E&S yang terkait dengan rantai pasokan CPO, menyimpulkan bahwa hanya sebagian kecil CPO klien yang bersumber dari perkebunannya sendiri, dan mencatat bahwa perusahaan induk adalah anggota aktif RSPO. Kajian tersebut tidak mengacu pada temuan Audit 2009 CAO, bahwa pendekatan untuk penyaringan dan penilaian ini tidak memenuhi persyaratan Standard Kinerja. Selanjutnya, kajian menilai kualitas kerja E&S dalam pengawasan sebagai "Sangat Baik", dan menyatakan bahwa "IFC berbagi pengetahuan tentang pengelolaan rantai pasokan kelapa sawit dan menyebabkan Perusahaan mengembangkan studi rantai pasokan untuk memandu upaya meningkatkan ketertelusuran dan keberlanjutan pasokan CPO." Studi kembali disebutkan dalam kaitannya dengan "Peran dan Kontribusi" E&S IFC, yang dinilai sebagai "Memuaskan." Namun, atas dasar dokumentasi yang tersedia dan wawancara dengan staf IFC, CAO belum mampu memverifikasi penyelesaian setiap studi yang relevan selain "Kajian Konsultan" yang dijelaskan di atas, yang ditugaskan oleh IFC dan yang tidak menghasilkan rencana tindakan yang disepakati. Tidak ada pelajaran E&S yang tercantum dalam kaitannya dengan proyek.

5.2.3. Temuan Kepatuhan CAO dalam Kaitannya dengan Pengawasan

Tanggapan IFC terhadap Audit 2009 dan dokumen strateginya menunjukkan bahwa pendekatan IFC untuk analisis, kajian dan pengelolaan rantai pasokan berkembang cukup baik selama periode di mana pinjaman DW berada di bawah pengawasan. IFC juga menerima dan menghasilkan informasi baru yang relevan dengan rantai pasokan CPO klien dan risiko E&S yang terkait selama periode pengawasan - khususnya melalui Kajian Konsultan, pernyataan publik Wilmar International sendiri, keterlibatan dengan para pemangku kepentingan di Indonesia selama proses strategi minyak kelapa sawit, dan pengaduan dari masyarakat.

Namun, CAO menemukan bahwa IFC tidak menyesuaikan pendekatannya untuk pengawasan pinjaman DW setelah adanya informasi baru yang tersedia tentang risiko E&S dalam rantai pasokan CPO Indonesia pada umumnya, atau yang dimiliki kliennya, Delta Wilmar. Secara khusus, IFC terus mengabaikan persyaratan PS1 yang mengatur agar klien melakukan analisis

³⁵ IFC, Kelompok Evaluasi Independen, "Evaluasi Operasi Investasi IFC," – http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ieg_ext_content/ifc_external_corporate_site/ieg+home/evaluationprocess/investment+operations/evalinvops.

³⁶ IFC, Kelompok Evaluasi Independen, *Kebijakan Akses ke Informasi*, 1 Juli 2011, - <https://ieg.worldbankgroup.org/Data/reports/A21.pdf>

rantai pasokan. Alih-alih, IFC mempertahankan posisi bahwa DW tidak perlu mengatasi masalah rantai pasokan karena: (a) itu bersumber hanya dari sebagian kecil pasokan dari perkebunan Indonesia milik Wilmar; dan (b) klien tidak dapat melacak atau mengontrol pasokan CPO; meskipun pernyataan dalam dokumen IFC dan oleh Wilmar International menyatakan sebaliknya. Dalam keadaan ini, CAO menemukan bahwa pendekatan IFC untuk pengawasan dan pemantauan Pinjaman DW tidak sesuai dengan kebijakan dan prosedurnya sendiri.

CAO mencatat pandangan IFC bahwa klien IFC diberikan daya tawar yang terbatas atas rantai pasokannya, dan keterlibatan dalam isu-isu rantai pasokan dilakukan dengan investasi lain dan staf E&S yang berhadapan langsung dengan perusahaan induk, Wilmar International. Sejauh IFC terlibat dalam kaitannya dengan risiko rantai pasokan Wilmar melalui Kajian Konsultan, CAO mencatat bahwa baik hubungan antara DW dan perkebunan tidak dikaji, dan juga masalah kontrol rantai pasokan dan ketertelusuran tidak dipertimbangkan. CAO juga mencatat bahwa meskipun Wilmar memberikan akses ke properti, fasilitas, dokumentasi dan personilnya, sifat Kajian Konsultan berarti bahwa tanggung jawab untuk analisis rantai pasokan bergeser dari klien ke IFC. Akibatnya, keterlibatan klien dalam proses tersebut terbatas.

CAO mengakui bahwa keterlibatan sukarela IFC dapat membantu membangun hubungan kerjasama dengan Wilmar, yang bisa melengkapi struktur pelaporan dan pengawasan yang diperlukan berdasarkan pinjaman DW. Namun, dengan berfokus pada dialog informal dan melakukan Kajian Konsultan di luar struktur pinjaman DW, IFC membatasi pilihan formalnya untuk hak hukum apabila keterlibatan sukarela tidak cukup untuk mengatasi risiko rantai pasokan yang diidentifikasi.

Selanjutnya, CAO mencatat bahwa tim proyek yang bertanggung jawab untuk mengelola pinjaman DW tidak terlibat dalam tanggapan institusional untuk pengaduan Wilmar-03. Akibatnya, isu yang diangkat oleh pengaduan tidak memberitahukan pendekatan IFC untuk pengawasan pinjaman DW.

Terakhir, CAO menemukan bahwa penjualan PT AP oleh Wilmar selama proses penyelesaian sengketa tidak menimbulkan masalah kepatuhan E&S CAO. Namun, pertanyaan mengenai tanggung jawab IFC untuk dampak E&S proyek setelah keterlibatan IFC dalam proyek berakhir - misalnya karena klien membayar pinjaman lebih awal - sering muncul dalam kasus CAO, dan akan memerlukan penjelasan lebih lanjut.

5.3. Konsultasi dan Pengungkapan Dalam Hubungannya Dengan Pinjaman DW

Temuan Kunci

- Masyarakat yang terkena dampak tidak diajak berkonsultasi dan tidak memiliki kesempatan untuk memberikan masukan pada Kajian Konsultan atau rancangan rencana tindakan yang dihasilkan yang ditugaskan oleh IFC sehubungan dengan perkebunan perusahaan induk di Indonesia.
- Proses yang didukung IFC untuk melakukan Kajian Konsultan tidak memenuhi persyaratan pengungkapan dan konsultasi PS1.

5.3.1. Konsultasi dan Pengungkapan - persyaratan IFC

Berdasarkan PS1, klien diharuskan melakukan pengungkapan tertentu dan berkonsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak di seluruh siklus hidup proyek. Ketika klien melakukan penilaian E&S, klien harus mengungkapkan dokumen penilaian.³⁷ Jika pada saat penilaian tersebut klien mengidentifikasi langkah-langkah atau tindakan mitigasi yang diperlukan untuk proyek tersebut untuk mematuhi hukum, peraturan dan PS yang berlaku, klien harus berkonsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak, dan mempersiapkan dan mengungkapkan rencana tindakan yang mencerminkan hasil dari konsultasi.³⁸

Konsultasi yang efektif membutuhkan "pengungkapan sebelumnya informasi yang relevan dan memadai, termasuk rancangan dokumen dan rencana", dan harus "memungkinkan masyarakat yang terkena dampak" untuk "menyatakan pandangan mereka mengenai risiko, dampak dan langkah-langkah mitigasi proyek".³⁹

5.3.2. Tindakan IFC Sehubungan dengan Konsultasi dan Pengungkapan

Seperti dibahas di atas, Kajian Konsultan pada awalnya digambarkan sebagai bagian yang membentuk pengawasan berkelanjutan DW.⁴⁰ Namun, pada akhirnya, proses penyusunan Kajian Konsultan dan penulisan rencana tindakan dilakukan oleh konsultan yang ditugaskan oleh IFC di luar kerangka kerja untuk pengawasan pinjaman DW. Wilmar International berpartisipasi dalam kajian dengan menyediakan akses ke properti, fasilitas, dokumentasi dan personilnya.

Metodologi Kajian Konsultan termasuk wawancara dengan anggota masyarakat yang terkena dampak, dan IFC melaporkan bahwa konsultan diberikan catatan konsultasi dengan pengadu dan pemangku kepentingan lainnya yang terjadi selama proses Strategi Minyak Kelapa. Selanjutnya, Kajian Konsultan mengidentifikasi kesenjangan kepatuhan dalam praktek pengungkapan dan konsultasi perkebunan Wilmar. Namun, tidak ada indikasi bahwa baik laporan Kajian Konsultan atau rancangan rencana tindakan menjadi subyek konsultasi dengan atau pengungkapan kepada masyarakat yang terkena dampak.

CAO mencatat pandangan IFC bahwa keanggotaan RSPO Wilmar dan komitmen Wilmar untuk sertifikasi menyediakan tempat lain untuk pengungkapan dan keterlibatan dengan masyarakat. Namun, seperti dibahas lebih lanjut dalam bagian 5.4 di bawah, CAO menemukan bahwa ketergantungan pada keanggotaan RSPO dan komitmen yang dinyatakan tersebut bukan merupakan pengganti persyaratan konsultasi dan pengungkapan PS, dan juga tidak cukup untuk memenuhi Kebijakan dan prosedur E&S IFC.

³⁷ PS1, 2006, para 20. Menurut Kebijakan Pengungkapan Informasi, ESRS yang diselesaikan oleh IFC harus diungkapkan dan, bersama dengan ESRS, IFC harus "membuat tersedia" salinan elektronik, dan apabila ada, tautan ke dokumen penilaian dampak sosial dan lingkungan yang relevan yang disiapkan oleh atau atas nama klien, termasuk rencana tindakan", para. 13(a).

³⁸ PS1, 2006, para. 16.

³⁹ PS1, 2006, para. 21.

⁴⁰ Surat dari President Zoellick kepada Marcus Colchester dan para pengadu, 28 Agustus 2009 - <http://goo.gl/qIXX6m>

5.3.3. Temuan Kepatuhan CAO Sehubungan dengan Konsultasi dan Pengungkapan

IFC tidak menerapkan persyaratan pengungkapan dan konsultasi PS1 pada Kajian Konsultan. Akibatnya, masyarakat yang terkena dampak tidak diajak berkonsultasi dengan dan tidak memiliki kesempatan untuk mengkaji Kajian Konsultan atau rancangan rencana tindakan yang dihasilkan.

5.4. Penyebab Mendasar Ketidakpatuhan

Kerangka Acuan CAO untuk investigasi kepatuhan ini menyatakan bahwa ruang lingkup investigasi harus mencakup "mengembangkan pemahaman tentang penyebab langsung dan mendasar untuk setiap ketidakpatuhan yang diidentifikasi oleh CAO." Seperti dijelaskan di atas, CAO menemukan bahwa IFC tidak secara benar menerapkan persyaratan rantai pasokan PS1 untuk pengawasan pinjaman DW. Masing-masing pengamatan ini dapat menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut pada masalah-masalah ini melalui fungsi Penasihat CAO. Lima penyebab yang saling terkait untuk ketidakpatuhan ini yang diidentifikasi adalah:

1. **Kepercayaan yang mendalam bahwa perjanjian yang mengatur investasi tidak mengharuskan DW mengambil tindakan apapun untuk mengatasi masalah rantai pasokan:** IFC tidak melibatkan klien untuk melakukan analisis rantai pasokan yang diharuskan oleh PS1. Seperti yang dijelaskan kepada CAO oleh anggota tim proyek IFC, mereka tidak menganggap ini sebagai pilihan, karena kebutuhan rantai pasokan tidak secara khusus diatur dalam perjanjian yang mengatur pinjaman DW. Untuk alasan yang diuraikan di atas, keyakinan ini salah. Namun demikian keyakinan ini terus bertahan dan tidak ada panduan yang menyatakan sebaliknya yang diberikan oleh manajemen IFC.
2. **Preferensi untuk mengatasi masalah rantai pasokan minyak sawit Indonesia dengan perusahaan induk secara sukarela dan di luar persyaratan E&S pinjaman DW:** Pendekatan ini konsisten dengan asumsi keliru bahwa perjanjian yang mengatur pinjaman DW tidak menjadi dasar bagi IFC untuk meminta dilakukannya tindakan pada isu-isu rantai pasokan. Staf IFC dengan pengetahuan langsung mengenai proyek menjelaskan kepada CAO bahwa ada kekhawatiran bahwa pendekatan yang lebih berbasis kepatuhan dapat menjadi kontra-produktif. Sebaliknya, manajemen berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan perusahaan induk, sebagai mitra potensial penting untuk keterlibatan masa depan IFC di sektor ini.
3. **Tidak terhubungnya pekerjaan IFC pada tingkat strategis dan pada tingkat pengawasan pinjaman DW:** Proses strategi minyak sawit adalah bagian penting tanggapan IFC terhadap Audit 2009 CAO. Namun, CAO mencatat bahwa strategi ini tidak mempengaruhi pengawasan IFC pada pinjaman DW. Proses strategi berfokus pada menetapkan sasaran dan pendekatan tingkat tinggi untuk investasi di sektor kelapa sawit, dan bukannya mengembangkan alat yang bisa diterapkan untuk tantangan dalam mengelola risiko rantai pasokan DW. Dalam proses investigasi CAO, staf IFC menekankan bahwa banyak pekerjaan yang telah dilakukan sejak tahun 2009 di dalam IFC untuk mempertimbangkan keberlanjutan dan manajemen risiko dalam rantai pasokan, terutama melalui unit Advisory Services IFC.⁴¹ Namun, materi ini kurang memiliki detil dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaannya, dan mereka tidak diterapkan pada pengawasan Pinjaman DW.

⁴¹ Secara khusus, staf mengacu pada *Buku Panduan Praktik Baik: Menilai dan Mengelola Risiko Lingkungan dan Sosial pada Rantai Pasokan Agribisnis IFC*, Agustus 2013 -<http://goo.gl/vdJAz2>

4. **Kurangnya pemahaman tentang isu-isu rantai pasokan minyak kelapa sawit secara umum, dan rantai pasokan Wilmar secara khusus:** Pada tahun 2006 dan 2008, ketika pinjaman DW disepakati, staf IFC mencatat bahwa hanya ada pemahaman dasar tentang isu-isu rantai pasokan dalam tim investasi (bahkan antara spesialis E&S). Karena pengetahuan dalam beberapa bagian IFC terus maju selama periode yang dipertimbangkan dalam investigasi ini, pengawasan pinjaman DW terus dilakukan atas dasar pendekatan dasar untuk pengelolaan risiko rantai pasokan. Secara khusus, CAO mencatat masih bertahannya pandangan yang diidentifikasi sebagai bermasalah pada Audit 2009 CAO untuk membenarkan kurangnya analisis rantai pasokan DW. Di sini CAO mengacu pada asumsi bahwa analisis rantai pasokan tidak diperlukan karena tidak mungkin bagi DW untuk melacak CPO kembali ke perkebunan tertentu di Indonesia ("ketertelusuran penuh").

CAO mencatat bahwa Standard Kinerja IFC tidak memerlukan ketertelusuran penuh sebagai dasar analisis atau mitigasi risiko rantai pasokan. Apabila mampu ketertelusuran penuh tidak dimungkinkan, praktik industri internasional yang baik ("GIIP") akan berfokus pada penelusuran maju CPO dari perkebunan berisiko tinggi: yaitu, mengidentifikasi daerah atau perkebunan individual yang memiliki tantangan E&S yang signifikan, dan kemudian menilai apakah produk dari tinggi perkebunan berisiko tinggi tersebut dapat ditelusuri ke pasokan klien. Rencana manajemen kemudian dapat bekerja untuk mengecualikan sumber CPO yang tidak dapat diterima dari basis pasokan, dan/atau merancang ulang rantai pasokan sehingga dapat dikelola secara lebih efektif.

CAO juga mencatat bahwa IFC terus secara signifikan bergantung pada keanggotaan RSPO perusahaan induk, dan partisipasi perusahaan induk dalam proses sertifikasi RSPO sebagai langkah manajemen risiko rantai pasokan. CAO mencatat pandangan IFC bahwa keterlibatan Wilmar International dengan RSPO memberikan kenyamanan yang cukup bahwa mereka bekerja untuk meningkatkan kinerja E&S perkebunannya di Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Audit 2009, pernyataan dukungan perusahaan induk pada prinsip-prinsip RSPO tidak seharusnya dilihat sebagai pengganti penerapan kebijakan, prosedur dan standard IFC. Lebih jauh, komitmen untuk bekerja menuju sertifikasi di masa depan dengan perusahaan induk tidak cukup untuk mengatasi risiko E&S yang diketahui terkait dengan CPO yang berasal dari Indonesia. Kesenjangan antara persyaratan RSPO dan PS IFC jelas diidentifikasi dalam Kajian Konsultan. Meskipun dengan melakukan sertifikasi RSPO, perkebunan Wilmar mungkin telah berkontribusi untuk pengurangan risiko, itu seharusnya tidak dilihat sebagai pengganti untuk langkah-langkah analisis dan pengelolaan risiko rantai pasokan yang diharuskan oleh PS1.

5. **Masalah yang terkait dengan persyaratan rantai pasokan dalam PS1 dan penafsiran mereka:** Dalam kasus DW, penafsiran PS1 oleh tim proyek menyiratkan bahwa kurangnya kontrol dan pengaruh terhadap rantai pasokan akan membebaskan klien dari persyaratan untuk menganalisis atau memitigasi risiko rantai pasokannya. Hal ini menyebabkan situasi paradoks dimana persyaratan analisis rantai pasokan klien IFC dapat menjadi lebih rendah karena risiko rantai pasokan meningkat. Dalam pandangan CAO, pendekatan ini tidak sejalan dengan GIIP, yang membutuhkan analisis rantai pasokan sebagai langkah awal, diikuti dengan dilakukannya identifikasi risiko, dan keterlibatan dalam mengidentifikasi pilihan untuk melakukan kontrol atau menyesuaikan

rantai pasokan untuk mengelola dampak dan risiko rantai pasokan dengan lebih baik.⁴² Dalam konteks ini CAO mencatat bahwa klarifikasi persyaratan rantai pasokan di bawah Standard Kinerja 2012 mungkin bermanfaat. Selanjutnya, CAO mencatat bahwa pengakuan IFC bahwa tim yang bertanggung jawab untuk mengawasi pinjaman DW memiliki paparan terbatas pada, dan pengetahuan terbatas mengenai, praktik yang baik dalam pengelolaan risiko rantai pasokan yang menjadi persyaratan rantai pasokan pada PS 2006. CAO mencatat bahwa, apabila persyaratan pengelolaan risiko E&S diperluas atau diperkenalkan dalam versi baru PS, staf IFC mungkin memerlukan bantuan tambahan untuk secara efektif mengkomunikasikan kewajiban-kewajiban tersebut kepada klien, dan untuk mengawasi pelaksanaannya.

⁴² Lihat, sebagai perbandingan, Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia (PBB, 2011, hal. 21-22, <http://goo.gl/mWCcjx>), dan Panduan Bisnis Multinasional OECD (OECD, 2011, para 14, 17, 23, 24, dan 50, <http://goo.gl/8MwPCI>).

6. Kesimpulan

Kesimpulan disajikan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam Kerangka Acuan untuk investigasi kepatuhan ini.

Pertanyaan 1: Apakah IFC sudah secara memadai meyakinkan dirinya bahwa COD lingkungan dan sosial pinjamannya kepada DW benar telah dipenuhi sebelum pencairan pada bulan Januari 2010?

IFC tidak meyakinkan dirinya bahwa COD E&S sudah dipenuhi sebelum pencairan pinjaman kepada klien pada tahun 2010. IFC tidak menjamin bahwa analisis risiko rantai pasokan yang diharuskan oleh PS1 dilakukan sebelum pencairan, dan alih-alih berusaha untuk mengatasi masalah rantai pasokan dengan perusahaan induk secara sukarela. Keputusan ini tidak konsisten dengan kebijakan E&S IFC.

Pertanyaan 2: Apakah IFC mengawasi investasi DW sesuai dengan kebijakan, prosedur dan standard E&S yang berlaku?

IFC tidak mengawasi pinjaman DW sesuai dengan kebijakan, prosedur dan standard E&S yang berlaku. Kewajiban terkait dengan analisis dan pengelolaan risiko rantai pasokan yang diatur dalam PS1 tidak diakui atau dipertimbangkan oleh tim proyek yang bertanggung jawab untuk pengawasan. Alih-alih, manajemen IFC berusaha untuk mengatasi masalah ini melalui keterlibatan sukarela dengan perusahaan induk DW, Wilmar International, namun cara ini tidak berhasil. Manajemen IFC tidak memberikan pedoman atau arahan kepada tim yang bekerja untuk DW mengenai masalah rantai pasokan. Akibatnya, risiko rantai pasokan yang diketahui tidak dipertimbangkan dalam proses pengawasan pinjaman DW oleh IFC.

Pertanyaan 3: Apakah IFC secara memadai meyakinkan dirinya sendiri DW melakukan analisis rantai pasokan sesuai dengan persyaratan Standard Kinerja 1?

IFC tidak meminta DW untuk melakukan analisis rantai pasokan, meskipun ada langkah yang dibuat pada tingkat strategis tentang isu-isu rantai pasokan, dan meskipun informasi spesifik tentang risiko rantai pasokan Wilmar Indonesia muncul dari: (a) Kajian Konsultan mengenai perkebunan perusahaan induk di Indonesia; dan (b) pengaduan Wilmar-03 kepada CAO.

Pertanyaan 4: Apakah IFC secara memadai meyakinkan dirinya bahwa DW telah memenuhi kewajibannya dalam kaitannya dengan konsultasi dan pengungkapan berdasarkan PS1?

Karena IFC tidak meminta klien untuk melakukan analisis rantai pasokan, persyaratan konsultasi dan pengungkapan PS1 tidak dipertimbangkan dalam konteks ini. Kajian Konsultan yang ditugaskan oleh IFC tidak dianggap sebagai konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak dan tidak ada informasi tentang hasil kajian ini yang telah diungkapkan. Pendekatan yang dilakukan tidak konsisten dengan persyaratan konsultasi dan pengungkapan PS1.

Pertanyaan 5: Apakah IFC secara memadai meyakinkan dirinya bahwa DW mengembangkan rencana tindakan untuk memenuhi persyaratan Standard Kinerja?

IFC tidak meminta DW untuk mengembangkan rencana tindakan apapun untuk memenuhi persyaratan rantai pasokan Standard Kinerja. Alih-alih, IFC berfokus pada keterlibatan dengan perusahaan induk secara sukarela. Meskipun rencana tindakan direkomendasikan oleh IFC kepada perusahaan induk dalam kaitannya dengan kinerja E&S perusahaan perkebunan mereka di Indonesia, tidak ada rencana tindakan yang disepakati pada akhirnya.

Pertanyaan 6: Apakah IFC secara memadai menanggapi masalah yang diangkat dalam pengaduan Wilmar-03 dalam konteks kewajiban E&S DW pada IFC?

Tim proyek IFC yang bertanggung jawab untuk pengawasan sehari-hari pinjaman DW tidak mengetahui betul masalah yang diangkat dalam pengaduan Wilmar-03 dan tidak menanggapi untuk membantu klien mereka mengatasi masalah yang diangkat.

Lampiran 1: Ringkasan Temuan Kunci

1.	Pencairan
1.1.	Dalam tanggapannya terhadap Audit 2009 CAO, manajemen IFC menerima bahwa terdapat kekurangan dalam uji tuntas rantai pasokan terkait dengan pinjaman DW.
1.2.	IFC tidak memastikannya sendiri bahwa Persyaratan Pencairan E&S, yang terkait dengan risiko dan dampak terhadap rantai pasokan, telah dipenuhi pada saat pihaknya memutuskan untuk mencairkan \$47,5 juta kepada klien pada bulan Januari 2010.
1.3.	IFC seharusnya menerapkan persyaratan rantai pasokan PS terkait dengan pinjaman DW. Namun, pihaknya justru berupaya untuk mengatasi masalah rantai pasokan dengan perusahaan induk secara sukarela. Keputusan tersebut tidak sesuai dengan Kebijakan E&S IFC.
1.4.	Pada saat pencairan, tidak terdapat informasi yang mencukupi untuk menyimpulkan bahwa persyaratan rantai pasokan seharusnya telah dipenuhi sepanjang jangka waktu yang wajar. Dengan demikian keputusan untuk mencairkan tidak sesuai dengan Kebijakan Berkelanjutan (para 17).
2.	Pengawasan
2.1.	Sepanjang jangka waktu pengawasan pinjaman DW, IFC terus memperlakukan investasi tersebut seakan-akan investasi tersebut tidak memiliki persyaratan rantai pasokan.
2.2.	IFC tidak menyesuaikan pendekatannya terhadap pengawasan pinjaman DW pada saat tersedianya informasi tentang risiko E&S yang serius dalam rantai pasokan perusahaan. Khususnya, IFC tidak mempertimbangkan hal berikut dalam pengawasannya terhadap pinjaman DW: <ul style="list-style-type: none"> • temuan Audit 2009 CAO; • temuan Kajian Konsultan terhadap Perkebunan Wilmar di Indonesia; atau • Pengaduan Wilmar-03 yang diajukan kepada CAO pada bulan November 2011.
2.3.	IFC berusaha untuk menanggapi kekurangan kinerja E&S pada tingkat grup melalui kegiatan sukarela dengan perusahaan induk. Bagaimanapun, kegiatan tersebut tidaklah mencukupi untuk menangani risiko E&S dalam rantai pasokan DW.
2.4.	Penjualan PT AP yang dilakukan oleh perusahaan induk selama proses penyelesaian sengketa CAO berlangsung tidak menimbulkan masalah kepatuhan E&S. Bagaimanapun, pertanyaan mengenai tanggung jawab IFC atas dampak E&S proyek setelah keterlibatan IFC dalam proyek berakhir, menjadi sering muncul di dalam kasus-kasus CAO, dan akan diperlukan penjelasan lebih lanjut.
3.	Pengungkapan
3.1.	Masyarakat yang terkena dampak tidak diajak berkonsultasi dan tidak memiliki kesempatan untuk memberikan masukan untuk Kajian Konsultan atau hasil rancangan rencana tindakan yang dibuat oleh IFC terkait dengan perkebunan perusahaan induk di Indonesia.
3.2.	Proses yang didukung oleh IFC dalam menjalankan Kajian Konsultan tidak memenuhi persyaratan pengungkapan dan konsultasi PS1.

Lampiran 2: Investasi IFC di Wilmar International

Proyek	Klien	Sponsor	Tipe	Standard IFC Terkait	Tanggal Disetujui/ Dilaksanakan	Jumlah Disetujui	Pencairan	Pengungkapan
Wilmar Trading – Indonesia No. 20348	Wilmar Trading	Wilmar International	Jaminan atas fasilitas pembiayaan pra-pengiriman	ESRP 1998 dan versi-versi setelahnya; Kebijakan Perlindungan 1998	Disetujui Mei 2004 Dilaksanakan Juni 2004	hingga 33,3 juta Dolar AS	November 2005	Januari 2007
Delta Wilmar CIS – Ukraina No. 24644	DW	Wilmar International	Pinjaman untuk pembangunan pemurnian CPO	ESRP 1998 dan versi-versi setelahnya; Kebijakan Perlindungan 1998	Disetujui Juni 2006 Dilaksanakan Juni 2006	17,5 juta Dolar AS	Oktober 2006: 15 Juta Dolar AS Januari 2010: 2,5 juta Dolar AS	Jun1 2013
Modal Kerja Wilmar – Indonesia No. 25532	Wilmar Trading	Wilmar International	Jaminan atas fasilitas pembiayaan pra-pengiriman	ESRP 2006 dan versi-versi setelahnya; Standard Kinerja IFC 2006	Disetujui Desember 2006 Dilaksanakan Februari 2007	Hingga 50 juta Dolar AS	Maret 2007	Juni 2009
Perluasan CIS Delta Wilmar	DW	Wilmar International	Pinjaman untuk perluasan kilang	ESRP 2007 dan versi-versi setelahnya; Standard	Disetujui Oktober 2008 Dilaksanakan November	45 juta Dolar AS	Januari 2010	Juni 2013

No. 26271			penyulingan CPO	Kinerja IFC 2006	2008			
------------------	--	--	--------------------	---------------------	------	--	--	--

Lampiran 3: Pengaduan pada CAO Mengenai Wilmar

Judul Kasus CAO	Wilmar-01/ Kalimantan Barat	Wilmar-02/Sumatera	Wilmar-03/Jambi
Tanggal Pengaduan	7/18/2007	12/19/2008	11/9/2011
Status Kasus	Audit Kepatuhan dikeluarkan (Juni 2009) Audit Kepatuhan ditutup (Maret 2013).	Ditutup pada saat penyelesaian sengketa (Juni 2012).	Laporan Investigasi Kepatuhan dikeluarkan (Maret 2015).
Pengadu	Lembaga swadaya masyarakat atas nama kelompok-kelompok terkena dampak minyak kelapa sawit termasuk warga pribumi dan perkebunan rakyat yang diduga terkena dampak oleh perkebunan minyak kelapa sawit Wilmar; di Sumatera dan Kalimantan.	Pengaduan dari kelompok masyarakat yang diduga terkena dampak oleh perkebunan minyak kelapa sawit Wilmar, yang diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat; khususnya di Sumatera dan Kalimantan.	Lembaga swadaya masyarakat "atas nama kelompok-kelompok yang terkena dampak minyak kelapa sawit termasuk warga pribumi dan perkebunan rakyat" yang diduga terkena dampak oleh perkebunan minyak kelapa sawit Wilmar yang merupakan sumber minyak kelapa sawit Wilmar; khususnya di Sumatera dan Kalimantan.
Perhatian	<ul style="list-style-type: none"> • Pembakaran ilegal untuk mengosongkan lahan. • Pembabatan hutan primer. • Pembabatan wilayah-wilayah yang memiliki nilai konservasi tinggi. • Pengambilalihan tanah adat warga pribumi tanpa proses hukum yang benar. • Kegagalan dalam melaksanakan musyawarah yang bersih, terdahulu dan disepakati dengan warga pribumi yang mengarah ke dukungan luas dari warga. • Kegagalan dalam bernegosiasi dengan masyarakat atau dalam mematuhi perjanjian-perjanjian yang telah dinegosiasikan. • Kegagalan dalam menentukan wilayah perkebunan rakyat yang disepakati. • Konflik sosial yang dipicu oleh tindakan-tindakan represif yang dilakukan 	Serupa dengan Wilmar-1, dengan tambahan konflik lahan antara masyarakat dan sejumlah anak perusahaan Wilmar sebagai hasil dari ketidakpatuhan dengan PS5.	<ul style="list-style-type: none"> • Mendirikan pemukiman di lahan warga yang dianggap bertentangan dengan Standard Kinerja IFC dan dengan cara-cara yang memaksa. • Pelanggaran yang serius terhadap hak asasi manusia dan pengusiran paksa anggota masyarakat setempat yang dilakukan oleh staf PT AP dan Brigade Mobil (BRIMOB) yang disewa oleh PT AP. • Pembabatan dan penanaman perkebunan tanpa membayar kompensasi atas tanah dan harta benda lainnya yang diambilalih. • Masalah perolehan tanah dan penyelesaian sengketa di anak-anak perusahaan Wilmar.

	<p>oleh perusahaan dan satuan pengamanan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kegagalan dalam melaksanakan atau menunggu persetujuan dari penilaian dampak lingkungan yang diwajibkan secara hukum.• Pembabatan hutan dan lahan gambut tropis tanpa mendapatkan perizinan yang diwajibkan oleh hukum.		
--	--	--	--

Lampiran 4: ToR Investigasi CAO

[...] mandat kepatuhan CAO adalah untuk menjalankan investigasi kepatuhan terhadap IFC, dan bagaimana IFC memastikannya sendiri atas kinerja sosial dan lingkungan dari investasi-investasinya. Fokus dari proses ini adalah bagaimana penilaian dan pengawasan yang dilakukan oleh IFC terhadap suatu investasi, dan apakah IFC mematuhi ketentuan-ketentuan kebijakannya sendiri atau tidak. CAO tidak menjalankan investigasi kepatuhan terhadap klien IFC. [...]

Cakupan Investigasi Kepatuhan

Fokus dari investigasi kepatuhan adalah terhadap IFC, dan bagaimana IFC memastikannya sendiri atas kinerja sosial dan lingkungan pada saat penilaian dan selama pengawasan berlangsung.

Pendekatan terhadap investigasi kepatuhan dijelaskan di dalam Pedoman Operasional CAO (Maret 2013), yang menyatakan bahwa definisi yang diterapkan atas investigasi kepatuhan yang diadopsi oleh Kepatuhan CAO adalah sebagai berikut:

Investigasi adalah proses verifikasi yang sistematis dan terdokumentasi dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif untuk menentukan apakah kegiatan-kegiatan, kondisi-kondisi, sistem manajemen sosial dan lingkungan atau informasi terkait lainnya, sudah sesuai dengan kriteria investigasi kepatuhan.

Terkait dengan masalah yang muncul dari pengaduan, investigasi kepatuhan akan mempertimbangkan:

- apakah IFC memastikannya sendiri dengan mencukupi bahwa COD sosial dan lingkungan atas pinjamannya kepada DW pada faktanya telah terpenuhi sebelum pencairan di bulan Januari 2010; dan
- Apakah IFC mengawasi investasi DW-nya sesuai dengan kebijakan, prosedur dan Standard E&S yang berlaku.

Lebih khususnya dalam kaitannya dengan pengawasan proyek, investigasi kepatuhan akan mempertimbangkan:

- apakah IFC memastikannya sendiri dengan mencukupi bahwa DW telah menjalankan analisis rantai pasokan sesuai dengan persyaratan-persyaratan Standard Kinerja 1;
- apakah IFC memastikannya sendiri dengan mencukupi bahwa DW telah memenuhi kewajiban-kewajibannya terkait dengan konsultasi dan pengungkapan berdasarkan Standard Kinerja 1;
- apakah IFC memastikannya sendiri dengan mencukupi bahwa DW mengembangkan Rencana Tindakan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan Standard Kinerja; dan
- apakah IFC menanggapi dengan mencukupi masalah yang dimunculkan oleh pengaduan Wilmar-3 dalam rangka kewajiban sosial dan lingkungan DW terhadap IFC;

Terkait dengan masalah-masalah ini, CAO hanya akan memeriksa tindakan-tindakan IFC yang berkaitan dengan pengawasan investasi DW-nya dalam jangka waktu setelah penuntasan Audit 2009. Melihat masalah yang dimunculkan oleh pengaduan, investigasi juga akan membatasi dirinya sendiri kepada dampak rantai pasokan investasi DW di Indonesia.

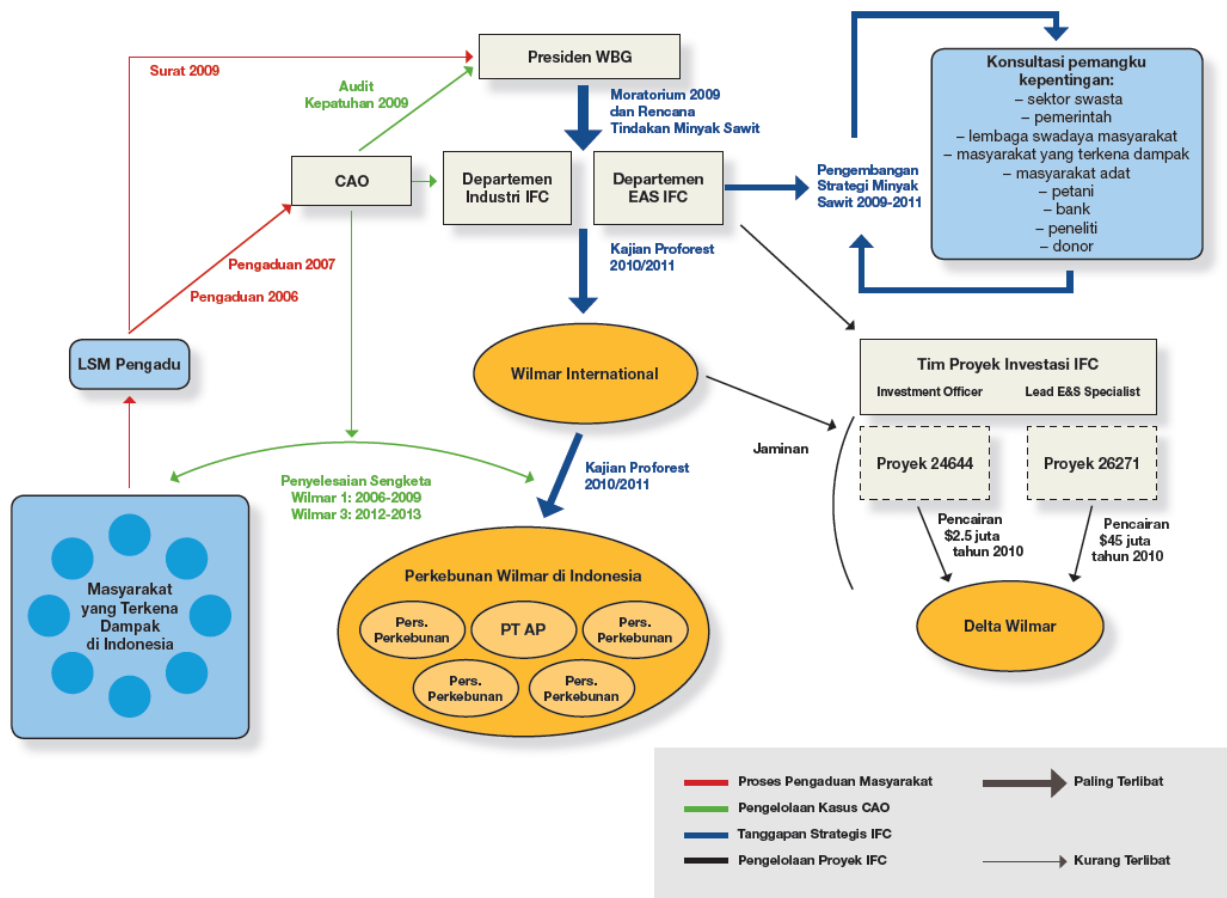
Dan dalam semua kasusnya, cakupan investigasi termasuk pengembangan pemahaman sebab-sebab langsung dan pokok untuk setiap ketidakpatuhan yang diidentifikasi oleh CAO.⁴³

⁴³Kerangka Acuan selengkapnya dapat dilihat pada situs CAO -<http://goo.gl/jxMTfl>

Lampiran 5: Ikhtisar Tanggung Jawab Staf IFC dan Siklus Proyek

Investigasi ini mempertimbangkan tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang diambil oleh staf IFC yang tersebar di sejumlah tim operasional yang berbeda-beda. Peran dan tanggung jawab dari para anggota staf tersebut mengalami perubahan sepanjang jangka waktu investigasi dikarenakan pinjaman DW berjalan melalui tahapan-tahapan yang berbeda dari siklus proyek dan IFC mengalami perubahan kelembagaan. Gambar 2 di bawah ini menampilkan diagram organisasi yang telah disederhanakan untuk menggambarkan bagaimana bagian-bagian IFC yang berbeda terlibat dalam manajemen pinjaman DW dan tanggapan terhadap pengaduan tentang investasi minyak kelapa sawit IFC yang muncul dari waktu ke waktu.

Gambar 2: Diagram Organisasi



Pendekatan IFC dalam mengkaji, menyetujui dan mengelola investasi berbeda-beda tergantung pada tipe investasi dan profil risikonya. Bagaimanapun, elemen utamanya konstan. Pendekatan tersebut dirangkum dalam kotak di bawah ini.⁴⁴

- **Pengembangan Usaha dan Kajian Awal:** Tim investasi IFC mengidentifikasi investasi yang potensial yang didasarkan pada tujuan-tujuan strategis IFC. Pejabat Investasi (IO/ *Investment Officer*) terlibat dengan klien-klien potensial, dan menyiapkan deskripsi

⁴⁴Diadaptasi dari halaman situs Siklus Proyek IFC -<http://goo.gl/c1T2xl>

mengenai proyek yang diusulkan. Manajemen IFC memutuskan apakah akan melanjutkannya dengan penilaian proyek.

- **Penilaian / Uji Tuntas:** Tim proyek menilai potensi, risiko dan kesempatan usaha yang berkaitan dengan investasi termasuk risiko E&S. Tim proyek terdiri dari IO dan berbagai ahli termasuk pengacara dan spesialis E&S. Apabila diperlukan, rencana tindakan E&S akan dikembangkan.
- **Kajian Investasi:** Tim proyek mempresentasikan proyek kepada manajemen. Manajemen memutuskan apakah akan mempresentasikan proyek atau tidak kepada Dewan Direksi IFC.
- **Pemberitahuan Publik dan Negosiasi:** Rincian mengenai investasi yang diusulkan diungkap kepada publik, dan tim proyek memulai negosiasi dengan klien.
- **Kajian dan Persetujuan Dewan:** Investasi yang diusulkan diserahkan kepada Dewan Direksi IFC untuk dipertimbangkan dan mendapatkan persetujuan.
- **Komitmen:** IFC dan klien menandatangani perjanjian legal investasi.
- **Pencairan Dana:** Seketika setelah klien memenuhi setiap persyaratan pencairan, IFC akan mengeluarkan dana secara tahap.
- **Pengawasan Proyek:** IFC mengawasi investasi untuk memastikan dipatuhinya ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pinjaman. Klien menyerahkan laporan berkala tentang kinerja keuangan dan E&S. Setelah pencairan, tanggung jawab utama untuk mengawasi kinerja investasi dialihkan ke manajer portofolio.
- **Penutupan dan Evaluasi:** Sebuah proyek akan ditutup ketika investasi telah dilunasi sepenuhnya atau ketika IFC memutuskan untuk mendivestasi atau menghapuskan utang yang tersisa. IFC mengevaluasi kinerja dan dampak pengembangan proyek.